



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2022**

KEMENTERIAN KESEHATAN

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III MERAUKE

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan kasih-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke Tahun 2022 dapat tersusun, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya di berikan kepada Tim Lakip dan semua pihak yang telah membantu dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan atau pencapaian kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun sebagai pertanggungjawaban Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atas pertanggungjawaban dan keberhasilan dalam melaksanakan program/kerja selama 1 (satu) tahun melalui beberapa indikator kinerja dengan perjanjian kinerja yang telah dibuat tahun 2022. Laporan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara PAN dan reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Laporan Instansi Pemerintah. Hasil ini diharapkan dapat memberikan manfaat peningkatan dan pencapaian kinerja di tahun yang akan datang.

Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja ini belum sempurna, oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari pihak yang berkompeten guna peningkatan kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke pada tahun - tahun berikutnya.

Merauke, 20 Januari 2023
Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas III Merauke



Syarif Abubakar Katili, S.H., M.Si.
NIP. 197305161997031004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja disusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke tahun 2022 yang menjelaskan pencapaian target indikator-indikator sasaran sebagaimana telah ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja kegiatan masing-masing program diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan target kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke merupakan turunan dari Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) yang dalam prakteknya terdapat 7 (tujuh) Indikator yang kemudian dijabarkan menjadi kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas III Merauke. Terdapat 7 (tujuh) indikator dalam Perjanjian Kinerja KKP Kelas III Merauke tahun 2022 dengan persentase capaian target sebagai berikut :

1. Indeks deteksi faktor risiko di pintu masuk negara 105%
2. Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan 100%
3. Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara 92%
4. Nilai kinerja anggaran 104%
5. Nilai Indikator kinerja pelaksanaan anggaran 96%
6. Kinerja implementasi WBK Satker 96%
7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya 116 %

Kegiatan ini didukung dari sumber daya anggaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke yang bersumber dari Rupiah Murni dan Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 13.319.590.000,-. Dari total anggaran yang disediakan terserap sebesar Rp. 11.993.552.769,- (90,04 %).

Keberhasilan yang telah dicapai di tahun 2022 dapat dijadikan sebagai dasar untuk melanjutkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2023 dan sekaligus menjadi pedoman agar kegiatan-kegiatan di masa mendatang hasilnya lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Target yang tidak tercapai pada tahun 2022 dapat dijadikan sebagai pelajaran dan permasalahan/kendala yang dihadapi mengakibatkan target tidak tercapai dapat dicarikan solusinya sehingga permasalahan tahun 2022 tidak muncul di tahun 2023. Untuk dapat meningkatkan capaian kinerja di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke pada tahun berikutnya, diharapkan para Pelaksana Program melakukan evaluasi dan meningkatkan kualitas perencanaan, lebih mencurahkan konsentrasinya terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, selalu berkoordinasi untuk peningkatan jejaring kerja baik dengan lintas program dan lintas sektor serta kegiatan yang terarah dan berkesinambungan.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR RINGKASAN/DEFENISI/ISTILAH.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GRAFIK.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I.PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan tujuan	2
C. Tugas pokok dan fungsi.....	3
D. Struktur organisasi.....	4
E. Sumber Daya Manusia	10
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II.PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	16
A. Perencanaan Kinerja.....	16
B Perjanjian Kinerja	18
BAB III.AKUNTABILITAS KINERJA.....	20
A. Pengukuran Kinerja.....	20
B Sumber Daya Anggaran	62
C Sumber Daya Sarana dan Prasarana	69
BAB IV.PENUTUP	70
A Kesimpulan.....	70
B. Tindak Lanjut	71

DAFTAR SINGKATAN/DEFINISI/ISTILAH

KKP	: Kantor Kesehatan Pelabuhan
PLBD	: Pos Lintas Batas Darat, merupakan pintu masuk melalui darat di suatu Negara, termasuk yang digunakan oleh kendaraan darat dan kereta api.
Direktorat Jenderal P2P	: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Vektor	: Serangga atau hewan lain yang biasanya membawa bibit penyakit yang merupakan suatu risiko bagi kesehatan masyarakat
Alat angkut	: Pesawat udara, kapal laut, kereta api, kendaraan bermotor atau alat angkut lainnya yang digunakan dalam melakukan perjalanan internasional
Pelabuhan	: Pelabuhan laut atau pelabuhan yang terletak pada sungai dan danau, tempat kapal yang melakukan perjalanan datang dan berangkat.
PHEIC	: Public Health Emergency of International Concern, merupakan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia
Karantina	: Pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang diduga terinfeksi penyakit meski belum menunjukkan gejala penyakit. Pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang yang diduga terkontaminasi dari orang/barang lainnya, sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi
Sanitasi	: suatu usaha pencegahan penyakit dengan melenyapkan atau mengendalikan faktor-faktor risiko lingkungan yang merupakan mata rantai penularan penyakit

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	Kenaikan Pangkat Pegawai 14
Tabel 2	Kenaikan Gaji Berkala 14
Tabel 3	Perencanaan Kinerja KKP Kelas III Merauke Tahun 2020-2024 17
Tabel 4	Rencana Kinerja Tahun 2022 18
Tabel 5	Perjanjian Kinerja tahun 2022 19
Tabel 6	Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2022..... 21
Tabel 7	Parameter Pengukuran Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara 22
Tabel 8	Target dan Capaian Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara 23
Tabel 9	Perbandingan capaian target dengan tahun sebelumnya 24
Tabel 10	Perbandingan capaian target 2022 dengan target tahun 2023 dan 2024 25
Tabel 11	Capaian target indikator pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dibandingkan dengan KKP Kelas II Kupang, KKP Kelas II Jayapura dan KKP Kelas III Sampit. 26
Tabel 12	Realisasi anggaran indikator indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara 28
Tabel 13	Parameter Faktor Risiko yang Dikendalikan di KKP Kelas II Merauke Tahun 2022 30
Tabel 14	Faktor Risiko yang Ditemukan dan Dikendalikan 30
Tabel 15	Faktor risiko yang ditemukan dan dikendalikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya 31
Tabel 16	Faktor Risiko yang ditemukan dan Dikendalikan dibandingkan dengan Target tahun 2022- 2024 31
Tabel 17	Capaian target indikator faktor risiko yang ditemukan dan dikendalikan dibandingkan dengan KKP Kelas III Kupang, KKP Kelas II Jayapura dan KKP Kelas III Sampit 32

Tabel 18	Realisasi anggaran indikator persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang ditemukan dan dikendalikan dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	34
Tabel 19	Persentase Parameter Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara	36
Tabel 20	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya	37
Tabel 21	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara yang Dibandingkan dengan Tahun 2022, 2023 dan 2024	37
Tabel 22	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara dibandingkan dengan KKP Kelas II Kupang, KKP Kelas II Jayapura dan KKP Kelas III Sampit	38
Tabel 23	Realisasi anggaran indikator indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara	41
Tabel 24	Capaian indikator kinerja anggaran dibandingkan tahun sebelumnya	44
Tabel 25	Capaian indikator nilai kinerja anggaran dibandingkan dengan target tahun 2023, dan 2024	45
Tabel 26	Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	49
Tabel 27	Realisasi Anggaran Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	53
Tabel 28	Realisasi anggaran indikator kinerja implementasi WBK Satker	58
Tabel 29	Realisasi anggaran indikator persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	62
Tabel 30	Realisasi Belanja Per Sumber Dana	62
Tabel 31	Persentase Serapan Anggaran Perbulan	63
Tabel 32	Penerimaan dan Realisasi PNPB	64
Tabel 33	Realisasi KRO dan RO Tahun 2022	65
Tabel 34	Neraca Sarana dan Prasarana	69

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1	Distribusi ASN berdasarkan jabatan 10
Grafik 2	Distribusi ASN berdasarkan latar belakang pendidikan..... 11
Grafik 3	Rincian pegawai honorer berdasarkan Penerimaan 11
Grafik 4	Distribusi ASN dan Honorer beradasarkan wilayah kerja 12
Grafik 5	Distribusi ASN berdasarkan golongan 13
Grafik 6	Perbandingan capaian target indikator pemeriksaan OBAA dibandingkan tahun sebelumnya..... 24
Grafik 7	Perbandingan capaian target tahun 2022 dengan standar nasional..... 32
Grafik 8	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022..... 43
Grafik 9	Perbandingan Persentase Capaian Target Nilai Kinerja Anggaran..... 44
Grafik 10	Perbandingan target tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024..... 45
Grafik 11	Perbandingan capaian target dengan standar nasional..... 46
Grafik 12	Capaian indikator nilai kinerja anggaran dibandingkan dengan KKP Kelas II Kupang, KKP Kelas II Jayapura dan KKP Kelas III Sampit..... 46
Grafik 13	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)..... 49
Grafik 14	Perbandingan capaian target 2022 dengan tahun sebelumnya..... 50
Grafik 15	Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)..... 50
Grafik 16	Perbandingan capaian target dengan standar Nasional..... 51
Grafik 17	Capaian nilai indikator kinerja dibandingkan dengan KKP Kelas II Kupang, KKP Kelas II Jayapura dan KKP Kelas III Sampit..... 52
Grafik 18	Perbandingan capaian target dengan tahun sebelumnya..... 55
Grafik 19	Perbandingan capaian target dengan tahun 2023 dan tahun 2024..... 56
Grafik 20	Capaian indikator penilaian kinerja implepentasi WBK dibandingkan dengan KKP Kelas II Kupang, KKP Kelas III Jayapura dan KKP Kelas III Sampit..... 57
Grafik 21	Perbandingan presentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya..... 59
Grafik 22	Perbandingan capaian target dengan tahun sebelumnya..... 60
Grafik 23	Perbandingan capaian target dengan target jangka menengah..... 60
Grafik 24	Perbandingan capaian target dengan KKP lain yang sejenis..... 61
Grafik 25	Realisasi Belanja Per Sumber Dana..... 63

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Struktur Organisasi	4
Gambar 2 Peta Wilayah Kerja KKP Kleas III Merauke	5
Gambar 3 Wilker Pelabuhan Laut Agats	6
Gambar 4 Wilker Pelabuhan Laut Bade	6
Gambar 5 Wilker Pelabuhan Laut Wanam	7
Gambar 6 Wilker PLBDN Sota	8
Gambar 7 Wilker PLBD Mindiptana	8
Gambar 8 Pos Pelabuhan Laut Merauke	9
Gambar 9 Pos Bandara Mopah Merauke	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya. Oleh karena itu perlu disusun rencana pembangunan kesehatan yang berkesinambungan upaya Kementerian Kesehatan untuk mewujudkan masyarakat dengan derajat kesehatan setinggi-tingginya, maka diperlukan tujuan, kebijakan dan strategi dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020- 2024 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Ancaman kesehatan masyarakat lainnya yang tidak dapat diabaikan adalah ancaman dalam bentuk risiko biologi, kimia, terorisme, radio-nuklir, penyakit *zoonosis* (penyakit tular hewan), kedaruratan kesehatan masyarakat, dan ancaman penyakit yang baru muncul (*new emerging diseases*). Adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020 harus dipergunakan sebagai pembelajaran terkait kesiapsiagaan menghadapi penyakit baru muncul (*new emerging diseases*), khususnya dalam menyiapkan sistem kesehatan yang mampu merespon kegawatdaruratan kesehatan masyarakat. Sekitar 70% dari penyakit infeksi pada manusia yang baru adalah penyakit *zoonosis*, yang sangat dipengaruhi oleh interaksi antara manusia dan lingkungannya. Penduduk Indonesia yang padat dengan geografis yang luas menyebabkan terbukanya transportasi di dalam negeri maupun antar negara yang dapat menyebabkan masuknya agen penyakit baru.

Ancaman ketahanan kesehatan dapat muncul dalam bentuk ancaman biologi,

kimia, terorisme, radio-nuklir, penyakit baru, kekurangan pangan, terlepas dari asal atau sumbernya. Sekitar 70% dari penyakit infeksi pada manusia yang (baru) muncul adalah penyakit *zoonosis*. Munculnya penyakit Covid-19 pada akhir tahun 2019 yang telah diumumkan oleh Badan Kesehatan Dunia pada awal tahun 2020 sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) dan pandemi telah membuka mata kita semua bahwa setiap negara termasuk Indonesia harus melakukan kesiapsiagaan (*preparedness*) dalam menghadapi penyakit infeksi baru, baik kemampuan pencegahan (*to prevent*), penemuan (*to detect*), dan merespon (*to respond*).

Terbukanya transportasi secara luas di dalam negeri maupun antar negara dapat menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk itu, respon ketahanan kesehatan atau *health security* penting untuk dilakukan. Evaluasi eksternal gabungan atau *Joint External Evaluation* (JEE) tahun 2017 mengidentifikasi bahwa sistem ketahanan kesehatan Indonesia masih lemah di bidang koordinasi dengan sektor lain. Dalam pencegahan, deteksi dan respon terhadap kondisi darurat kesehatan masyarakat; kualitas pengawasan, khususnya terkait patogen yang resisten terhadap antibiotik, penyakit infeksi baru, dan PD3I; dan analisis dan komunikasi data. Karena penyakit infeksi baru hampir semuanya bersifat *zoonosis* dan berkaitan.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke berperan dalam mewujudkan **Visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024 yakni “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”** dan pelaksanaan 9 misi pembangunan, khususnya misi ke-1 yaitu peningkatan kualitas manusia Indonesia. Sesuai arahan Presiden RI terkait pembangunan SDM yakni pembangunan SDM pekerja yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global. Kementerian kesehatan memiliki peran penting dalam rangka mencapai 9 (sembilan) agenda prioritas nasional yang dikenal dengan Nawacita, terutama agenda ke-5 meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

B. Maksud dan Tujuan

Pembuatan Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke secara tertulis, untuk mengetahui pencapaian program/kegiatan dan realisasi anggaran tahun 2022, yang harus dipertanggungjawabkan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke kepada Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Permenkes Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan yang menyebutkan Klasifikasi KKP sebagaimana dimaksud meliputi KKP Kelas I, II, III dan IV. KKP Kelas I berjumlah 7 (tujuh) KKP, KKP Kelas II berjumlah 26 (dua puluh enam), KKP Kelas III berjumlah 16 (enam belas) KKP, dan KKP Kelas IV berjumlah 2 (dua) KKP. Kantor Kesehatan Pelabuhan memiliki Tugas Pokok dan fungsi sebagai berikut :

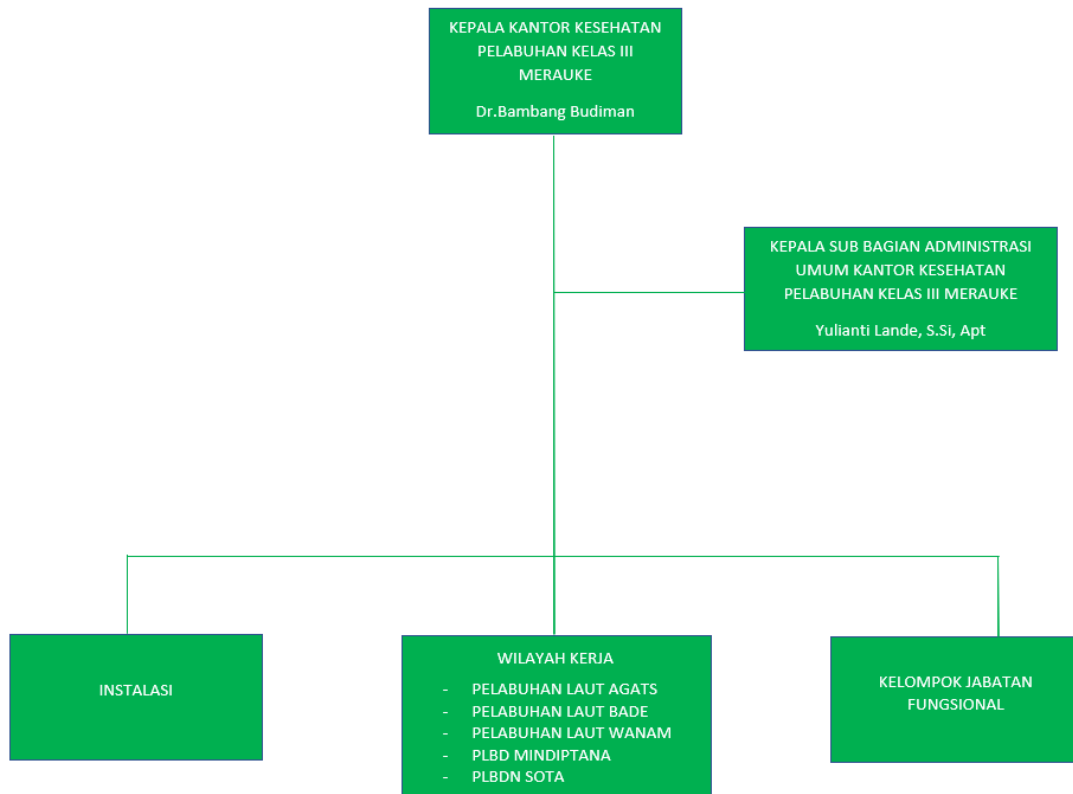
1. Tugas Pokok Kantor Kesehatan Pelabuhan

KKP mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko Kesehatan di wilayah kerja Pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara.

2. Fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan

- a. Penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko Kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
- c. Pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko Kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/ atau lingkungan;
- d. Pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko Kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/ atau lingkungan;
- e. Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus;
- f. Pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan;
- g. Pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan Kesehatan;
- h. Pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan Kesehatan;
- i. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan Kesehatan;
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kekarantinaan Kesehatan; dan
- k. Pelaksanaan urusan administrasi KKP

D. Struktur Organisasi



Gambar 1 Struktur Organisasi

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke terletak di Jl. Prajurit No. 01 Merauke Provinsi Papua, berdasarkan struktur organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke terdiri dari :

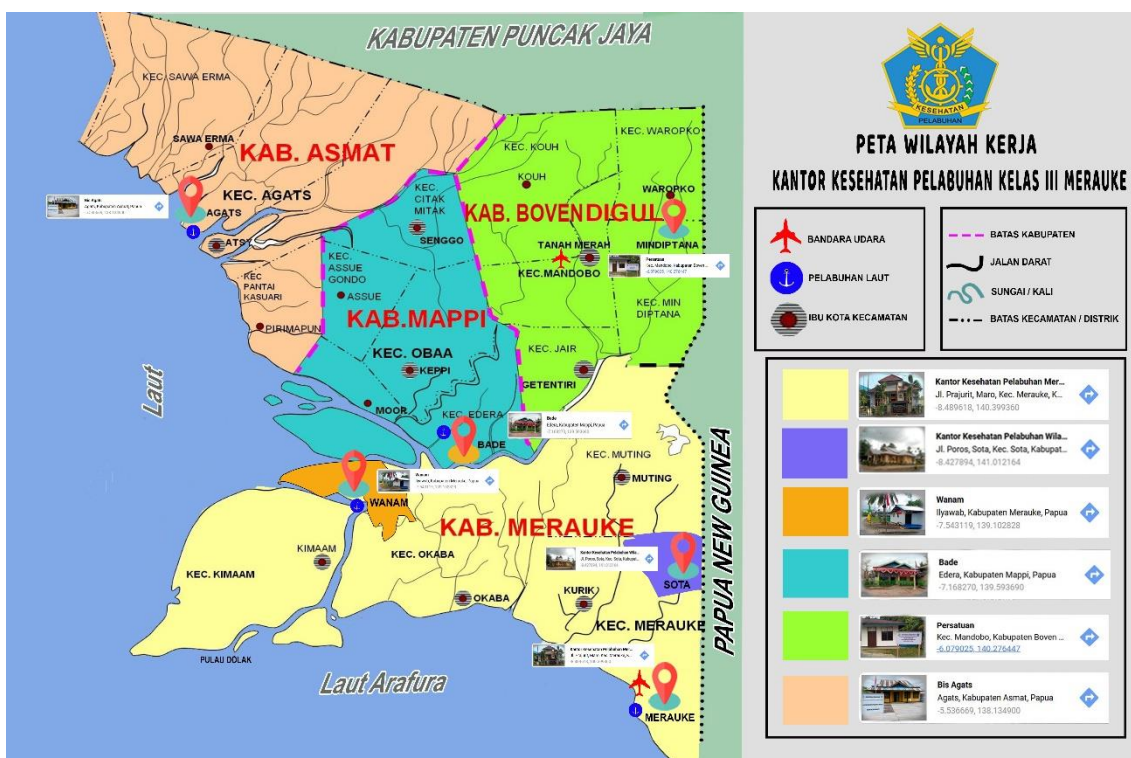
1. Kepala Kantor
2. Sub Bagian administrasi umum
3. Kelompok jabatan fungsional
4. Instalasi

Subbagian administrasi umum sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, dan hubungan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KKP Merauke, maka dibentuk Wilker KKP Merauke yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Wilker KKP merupakan unit kerja fungsional yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala KKP. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KKP sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan. Dalam pelaksanaan tugas ditetapkan koordinator

pelaksana fungsi pelayanan fungsional yang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai bidang dan tugas masing-masing, penugasan pejabat fungsional ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi sesuai bidang keahlian dan ketrampilan.

Kabupaten Merauke merupakan salah satu dari 29 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Papua, terletak dibagian selatan dan memiliki wilayah terluas diantara Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua. Secara geografis, Kabupaten Merauke terletak pada 137° - 141° BT dan 6° - 9° LS. Luas Kabupaten Merauke ±45.071 km². Sebagian besar wilayah Kabupaten Merauke merupakan dataran rendah dan berawan. Secara geografis, berbatasan langsung dengan Negara Papua New Guinea dan Australia. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke memiliki 5 wilayah kerja yang terletak di 4 (empat) kabupaten :



Gambar 2 Peta Wilayah Kerja KKP Kelas III Merauke

a. Wilker Pelabuhan Laut Agats/Asmat

Wilker Pelabuhan Laut Agats terletak di Kabupaten Asmat, Wilker Pelabuhan Laut Agats dapat ditempuh melalui jalur udara dengan waktu tempuh 1 jam atau jalur perjalanan laut selama ±48 jam. Sumber Daya Manusia sebanyak 3 (tiga) Orang yang terdiri dari koordinator wilayah dengan latar belakang pendidikan S1 Keperawatan, S1 Epidemiologi, D3 Kesehatan Lingkungan dan 1 (satu) orang tenaga honorer dengan latar belakang pendidikan SMA (petugas kebersihan).



Gambar 3 Kantor Wilker Pelabuhan Laut Agats

b. Wilker Pelabuhan laut Bade

Wilker Pelabuhan Laut Bade terletak di Kabupaten Mappi, Wilker Pelabuhan Laut Bade dapat ditempuh melalui jalur penerbangan dengan waktu tempuh 45 menit atau melalui jalur darat selama 6 jam dan dilanjutkan dengan menggunakan speedboat selama 4 jam. Sumber Daya Manusia di Pelabuhan Laut Bade sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri dari koordinator wilayah kerja dengan latar belakang pendidikan Entomolog , D3 Keperawatan dan dibantu 1 (satu) orang tenaga honorer dengan latar belakang pendidikan SMA (petugas kebersihan)

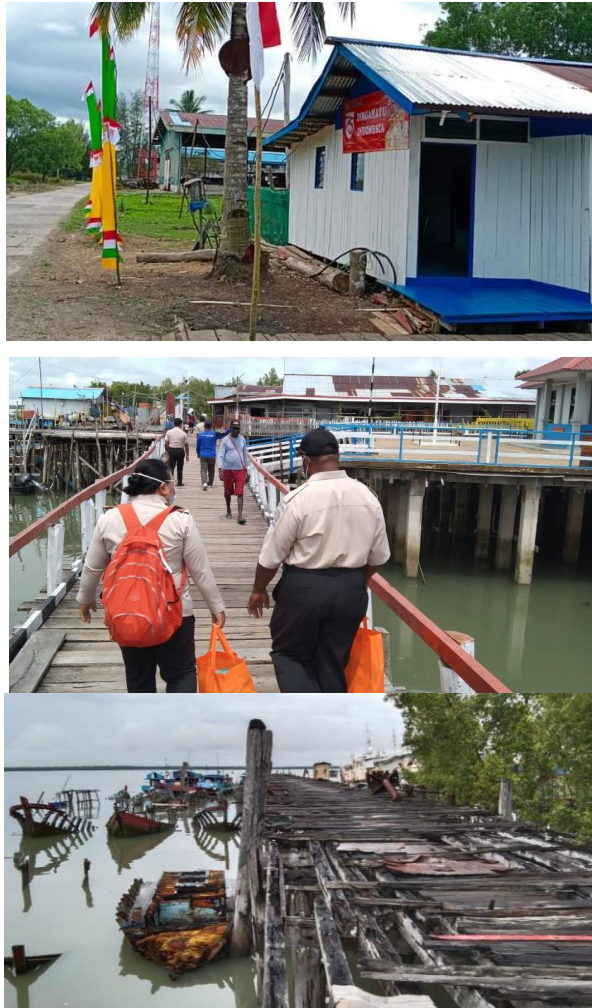


Gambar 4 Kantor Wilker Pelabuhan Laut Bade

c. Wilker Pelabuhan Laut Wanam

Wilker Pelabuhan Laut Wanam terletak di Kabupaten Merauke, Wilker Pelabuhan Laut Wanam dapat ditempuh melalui jalur penerbangan dengan waktu tempuh 45 menit atau melalui jalur laut dengan waktu tempuh 36 jam. Sumber Daya Manusia di Pelabuhan Laut Wanam 2 (satu) terdiri dari koordinator wilayah kerja dengan latar belakang pendidikan D3 Keperawatan

dan D4 Kesehatan Lingkungan



Gambar 5 Pelabuhan Laut Wanam

d. Wilker Pos Lintas Batas Darat Sota (PLBD)

Wilker Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN) Sota terletak di Kabupaten Merauke, Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN) Sota dapat ditempuh melalui jalur darat dengan waktu tempuh 1,5 jam (80 km). Sumber Daya Manusia di Pos Lintas Batas Darat Sota (PLBD) 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang koordinator wilayah kerja dengan latar belakang pendidikan dokter, 1 (satu) orang Sanitarian dan dibantu 1 orang tenaga honorer dengan latar belakang pendidikan SMA (petugas keamanan)



Gambar 6 Kantor Wilker PLBDN Sota

e. Wilker Pos Lintas Batas Darat Mindiptana

Wilker Pos Lintas Batas Darat Mindiptana berada di Kabupaten Boven Digoel Distrik Kombut (pemekaran dari Distrik Mindiptana), dapat ditempuh melalui jalur penerbangan dengan waktu tempuh 45 menit atau melalui jalur darat selama 10-11 jam. Perjalanan darat dari Kabupaten Merauke melewati Kabupaten Boven Digoel dengan jarak tempuh sekitar 475 km dalam waktu 8 Jam, kemudian dilanjutkan ke Distrik Mindiptana dengan jarak tempuh 110 km dalam waktu 2,5 jam. Dari Distrik Mindiptana menuju Distrik Kombut jaraknya 11 km dengan waktu tempuh 30 menit jika akses jalan bagus, tetapi jika hujan dan jalan rusak maka waktu tempuh bisa sampai 3 jam. Sumber Daya Manusia di Pos Lintas Batas Darat Mindiptana 2 dua) orang yang terdiri dari koordinator wilayah kerja dengan latar belakang pendidikan sanitarian, D3 Analisis Kesehatan dan dibantu 2 (dua) orang tenaga honorer dengan latar belakang pendidikan SMA sebagai pramubakti dan petugas kebersihan.



Gambar 7 Wilker PLBD Mindiptana

f. Pos Pelabuhan Laut Merauke

Pelabuhan Laut Merauke terletak di Kabupaten Merauke yang dapat ditempuh melalui jalur darat selama \pm 10 menit. Setiap hari petugas dari induk dijadwalkan melakukan pengawasan di Pelabuhan laut Merauke



Gambar 8 Pos Pelabuhan Laut Merauke

g. Pos Bandar Udara Mopah

Bandar Udara Kelas I Mopah merupakan bandara kelas I yang menghubungkan Kabupaten Merauke dengan kota-kota lain di Indonesia, terdapat 3 Maskapai penerbangan Nasional yang beroperasi di Bandara Mopah yaitu : maskapai penerbangan Garuda Air Lines, Lion Air Lines, dan Batik Air yang menggunakan Pesawat Boing 373-800NG, disamping itu juga terdapat Maskapai Susi Air dengan pesawat sejenis Twin otter/Caravan dan Pesawat Hercules milik TNI yang mengangkut bahan keperluan TNI dan mengangkut personel militer lainnya. Setiap hari petugas dari kantor induk dijadwalkan bertugas di Bandara Mopah.



Gambar 9 Pos Bandar Udara Mopah

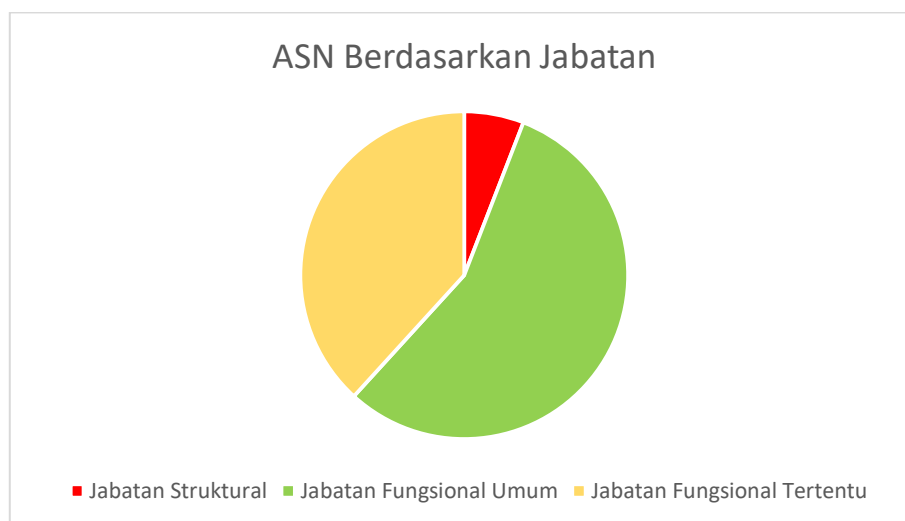
E. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi itu.

Jumlah SDM (pegawai) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke per 31 Desember 2022 sebanyak 56 orang (PNS sebanyak 34 orang dan tenaga honorer sebanyak 22 orang) dan rincian jumlah pegawai PNS sebagai berikut :

1. Menurut Jabatan

- a. Jabatan Struktural : 2 orang
- b. Jabatan Fungsional Umum : 19 orang
- c. Jabatan Fungsional tertentu : 13 orang



Grafik 1 : Distribusi ASN Berdasarkan Jabatan

2. Tingkat dan Jenis Pendidikan

a. Profesi

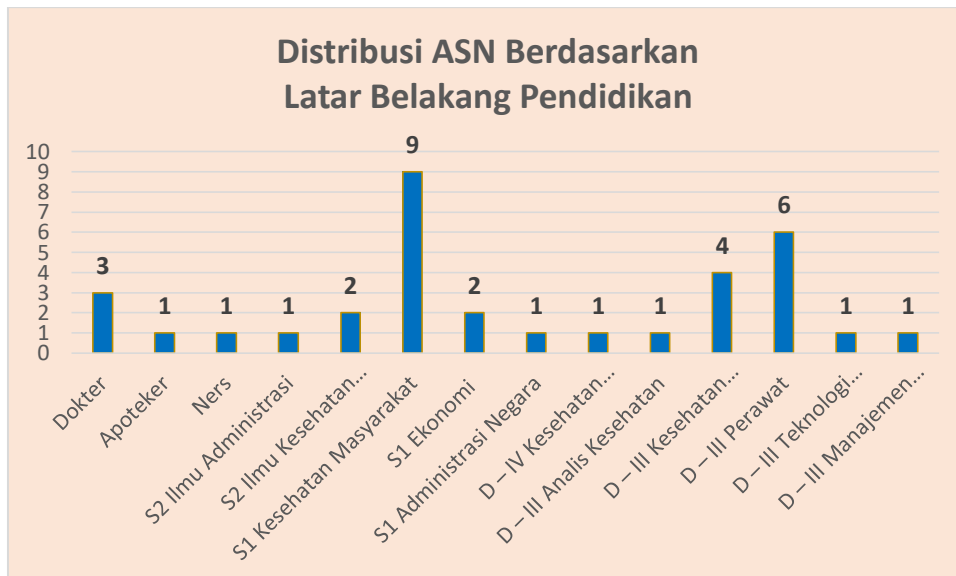
- Dokter : 3 orang
- Apoteker : 1 orang
- Ners : 1 orang
- Strata 2 (S2)
- S2 Ilmu Administrasi : 1 orang
- S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat : 2 orang

b. Strata 1 (S1)

- S1 Kesehatan Masyarakat : 9 orang
- S1 Ekonomi : 2 orang
- S1 Administrasi Negara : 1 orang
- D – IV Kesehatan Lingkungan : 1 orang

c. Diploma 3 (D III)

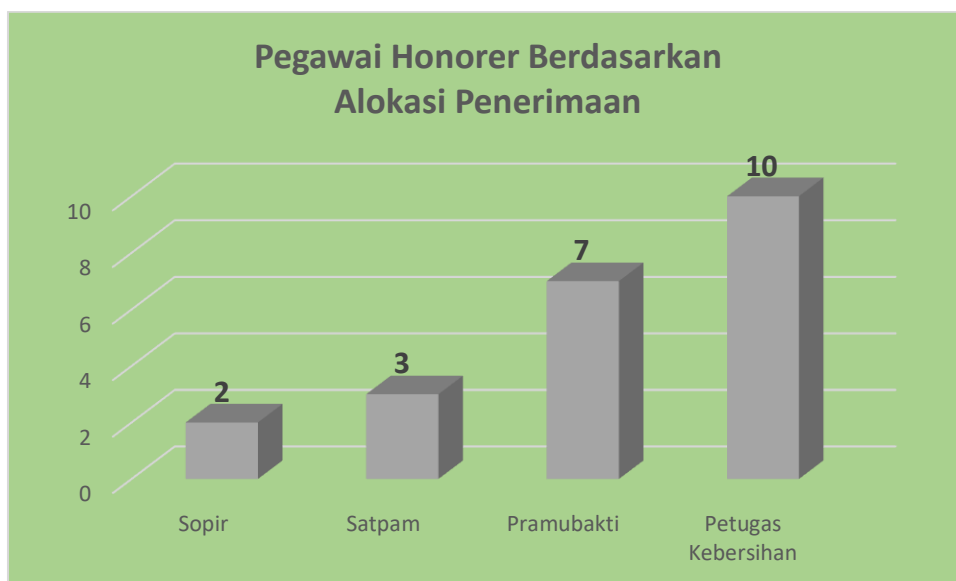
- D – III Analis Kesehatan : 1 orang
- D – III Kesehatan Lingkungan : 4 orang
- D – III Perawat : 6 orang
- D – III Teknologi Laboratorium Medis : 1 orang
- D – III Manajemen Informatika : 1 orang



Grafik 2 : Distribusi ASN Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

3. Rincian pegawai honorer berdasarkan alokasi penerimaan sebagai berikut :

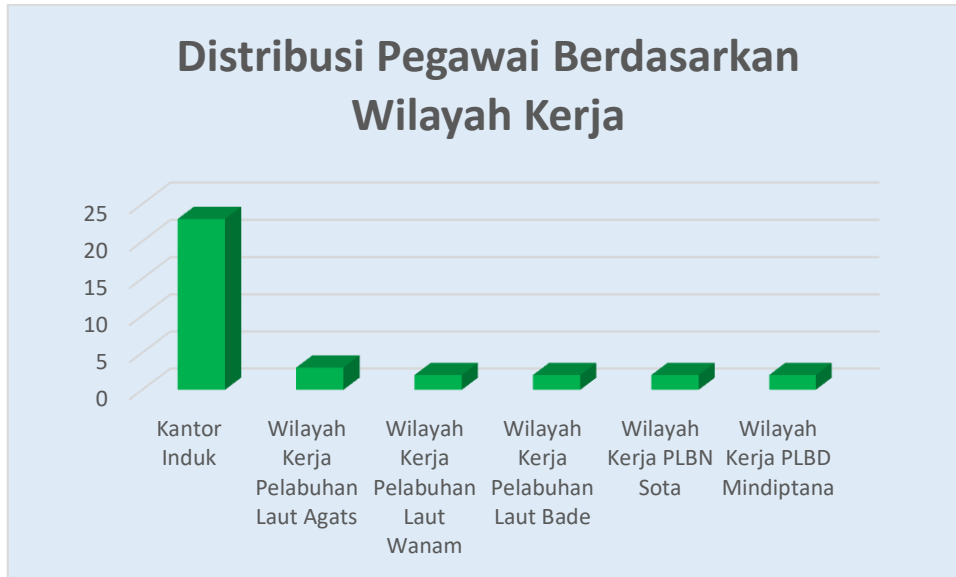
- Sopir : 2 orang
- Satpam : 3 orang
- Pramubakti : 7 orang
- Petugas kebersihan : 10 orang



Grafik 3 Rincian Pegawai Honorer Berdasarkan Alokasi Penerimaan

4. Distribusi pegawai berdasarkan wilayah kerja

- Kantor Induk : 23 orang
- Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Wanam : 2 orang
- Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Agats : 3 orang
- Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Bade : 2 orang
- Wilayah Kerja PLBN Sota : 2 orang
- Wilayah Kerja PLBD Mindiptana : 2 orang

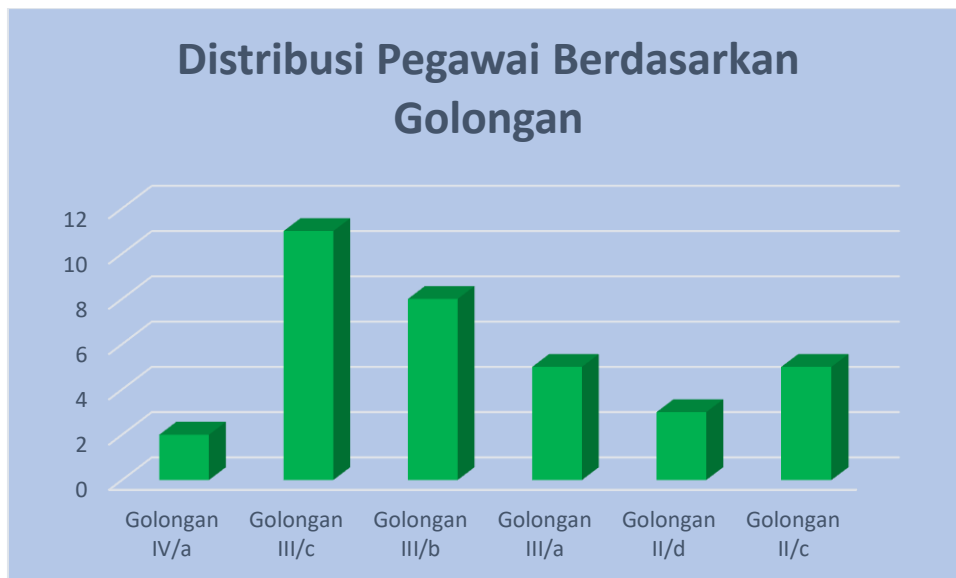


Grafik 4 Distribusi pegawai berdasarkan wilayah kerja

Distribusi pegawai di kantor induk sebanyak 39 orang, hal ini disebabkan karena di wilayah Merauke selain Pelabuhan Laut Yos Sudarso, Pelabuhan Laut Perikanan Nusantara, Pelabuhan Pertamina dan Pelabuhan Kelapa Lima juga terdapat pelabuhan rakyat diantaranya adalah : Pelabuhan Gudang arang, Pelabuhan Cikombong, Pelabuhan Sidomulyo, Pelabuhan Kumbe, Pelabuhan Kali Tamu, Pelabuhan Matandi, Pelabuhan Serapu dan Pelabuhan Lampu Satu. Setiap hari pegawai di kantor induk ditugaskan secara bergantian untuk melakukan pengawasan di pelabuhan dan Bandara Mopah Merauke.

5. Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan

- Golongan IV/a : 2 orang
- Golongan III/c : 11 orang
- Golongan III/b : 8 orang
- Golongan III/a : 5 orang
- Golongan II/d : 3 orang
- Golongan II/c : 5 orang



Grafik 5 Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan

6. Pegawai yang Mengikuti Tugas Belajar

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan menyatakan bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian, dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggara upaya kesehatan memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa dalam rangka memenuhi standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir ASN dapat dicapai melalui pendidikan formal berupa tugas belajar. Sesuai amanat Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, maka Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sebagai salah satu organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan perlu melaksanakan perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan. Salah satu bentuk pengembangan SDM Kesehatan dilaksanakan melalui program pendidikan berkelanjutan diantaranya tugas belajar. Surat Edaran ini dimaksudkan dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM kesehatan yang memiliki kualifikasi, keahlian atau kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, serta pengembangan organisasi melalui peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan kepribadian PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan

dalam pengembangan karir seorang PNS. Upaya memberikan kesempatan kepada setiap pegawai dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke telah mengirimkan pegawai untuk dapat meningkatkan jenjang pendidikan melalui tugas belajar. Tahun 2022 terdapat 2 orang pegawai atas nama Batseba Linda Imsula yang melakukan tugas belajar di Universitas Cenderawasih Jayapura dengan peminatan Keperawatan dan Yeremias Wonam yang melakukan tugas belajar di Universitas Diponegoro Semarang.dengan peminatan S2 Epidemiolog.

7. Kenaikan Pangkat

Pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke yang diusulkan untuk kenaikan pangkat untuk periode April 2022 dan Penerimaan CPNS pada Maret 2022 dapat dilihat pada tabel

Tabel 1 Kenaikan Pangkat Pegawai

NO	NAMA	NIP	GOL LAMA	GOL BARU	KETERANGAN
1	Martina Paulina Toker	198607072009122002	III a	III b	SK telah diterima
2	Muhammad Heriansyah, S.Tr.Kes	199612142022031002	-	III a	SK CPNS telah diterima
3	Wisnu Aji Adhanantyo, S.KM.	199704142022031004	-	III a	SK CPNS telah diterima
4	Oliaman Gea, A.Md.Kom	199610032022031004	-	II c	SK CPNS telah diterima
5	Aninda Safira Primadiasti, A.md.Kes	199902112022032001	-	II c	SK CPNS telah diterima
6	Hera Aldha Wardani, A.md.Kep	200001212022032001	-	II c	SK CPNS telah diterima

8. Kenaikan Gaji Berkala

Tabel 2 Kenaikan Gaji Berkala

No	Nama	NIP	TMT KGB
1	Gumson Josua Tampubolon, SKM, M.P.H.	198510172008011007	1 Januari 2022
2	Pius Tandi Rantetasak	197504152008011019	1 Januari 2022
3	Eni Sartika Simanjuntak, S.Sos	198007142014072007	1 Januari 2022
4	Johlwis Tamalonggehe	199010112018011001	1 Februari 2022
5	Tri Nindi Gaib	199406012018012001	1 Februari 2022
6	dr. Maryam Wangguway	198601192018012001	1 Februari 2022
7	Yeremias Wonam, SKM	197602061997031003	1 Maret 2022
8	Arwina Paramma, SKM	198205132006042002	1 Maret 2022
9	Hesti Syafran Gani, AMK	198001032010042001	1 Oktober 2022
10	Penataria Sianipar, SE	197904212010122002	1 Desember 2022
11	Batseba Linda Imsula	198109122008122001	1 Desember 2022
12	Elprida Silalahi, SKM	198506292010122003	1 Desember 2022
13	Ns. Muhin Steven Imbiri, S.Kep	198803062010121001	1 Desember 2022

F. Sistematika Penulisan

1. Kata Pengantar
2. Ringkasan Eksekutif
3. Daftar Isi
4. Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penulis laporan, maksud dan tujuan penulisan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke.

5. Bab II Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja

Bab ini menguraikan hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke pada tahun 2022, meliputi :

- a. Perencanaan Kinerja

Uraian singkat tentang Rencana Aksi Kegiatan tahun 2020 – 2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke

- b. Perjanjian Kinerja

Uraian singkat tentang Penetapan Kinerja KKP Kelas III Merauke Tahun 2022

- c. Bab III

Pada bagian ini disajikan hasil pengukuran dan analisis pencapaian kinerja yang didalamnya menjelaskan analisis per indikator dengan mengungkapkan kegiatan-kegiatan yang terkait langsung dengan indikator maupun yang bersifat pendukung, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan yang dihadapi serta usulan pemecahan masalah yang akan diambil

Pada bagian ini disajikan juga beberapa sumber daya yang mendukung dalam pencapaian kinerja, Sumber Daya Anggaran, Sumber Daya Sarana dan Prasarana.

- d. Bab IV Kesimpulan

Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang terkait dengan pencapaian kinerja KKP Kelas III Merauke serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan tahun depan.

- e. LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Form Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
- Form Pengukuran Kinerja (PK)

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima tahun) secara sistematis dan berkesinambungan. Perencanaan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke tertuang di dalam Rencana Aksi Kegiatan tahun 2020-2024

1. Rencana Aksi Kegiatan 2020-2024

Renstra Kementerian Kesehatan dituangkan dalam bentuk Rencana Aksi Program (RAP) Eselon I dan oleh Unit Pelaksana Tekhnis dituangkan dalam bentuk Rencana Aksi Kegiatan (RAK). Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan berupaya untuk mencapai sasaran program yang telah ditetapkan dalam RAK dengan melaksanakan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian sasaran dan tujuan program. Sebagai ukuran keberhasilan pencapaian sasaran Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, RAK KKP Kelas III Merauke 2020-2024 telah menetapkan 7 indikator kinerja Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan target indikator sasaran secara bertahap setiap tahun mulai Tahun 2020 sampai Tahun 2024.

7 (tujuh) indikator yang tertuang dalam Rencana Aksi Kegiatan 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Indeks deteksi faktor risiko di pintu masuk negara
2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan
3. Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara
4. Nilai kinerja anggaran
5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
6. Kinerja implementasi WBK Satker
7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

Adapun perencanaan kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3 Perencanaan Kinerja KKP Kelas III Merauke Tahun 2020-2024

No	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Pelayanan Kekearifan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1.	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekearifan kesehatan	297332	324800			
			Indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk negara			0,93	0,99	0,99
		2.	Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90 %	95%	100%	100%	100%
		3.	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	85 %	90 %	0,98	0,99	0,99
2.	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4.	Nilai kinerja anggaran	80	83	85	87	88
		5.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	80 %	90 %	93	95	95
		6.	Kinerja implementasi WBK satker	70	75	75	75	75
		7.	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	45 %	80 %	68 %	80 %	80 %

2. Rencana Kinerja Tahunan

Dalam menunjang tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke dalam melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/ atau faktor risiko Kesehatan di wilayah kerja Pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara, maka Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke menetapkan Rencana Kinerja Tahunan dengan target yang harus dilaksanakan/dicapai

Sasaran strategi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke adalah meningkatnya pelayanan kekearifan di pintu masuk negara dan wilayah dengan 7 (tujuh) indikator yang harus dilaksanakan dan dicapai, adapun indikator dan target tersebut dapat dilihat pada tabel :

Tabel 4 Rencana Kinerja Tahun 2022

No	SASARAN	NO	INDIKATOR	TAHUN 2022
1.	Meningkatnya Pelayanan Kekearifan diPintu Masuk Negara dan Wilayah	1.	Indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk negara	0,93
		2.	Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	100%
		3..	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintumasuk negara	0,98
2.	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4.	Nilai kinerja anggaran	85
		5.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93
		6.	Kinerja implementasi WBK satker	75
		7.	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	68 %

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja atau penetapan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke tahun 2022 merupakan pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada akhir tahun 2021. Penetapan kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke disusun berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, Rencana aksi Program Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dan rencana aksi kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke yang setiap tahunnya di operasionalkan menjadi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan telah mendapat persetujuan anggaran. Penetapan kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke tahun 2022 telah disusun, di dokumentasikan dan ditetapkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke pada akhir tahun 2021 setelah turunnya DIPA dan RKA-KL Tahun 2022. Target-target kinerja sasaran kegiatan yang ingin dicapai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke tercantum dalam dokumen Penetapan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke tahun 2022. Jumlah anggaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke Tahun 2022 sebesar **Rp. 13,319.590.000,-**.

Tabel 5 Perjanjian Kinerja tahun 2022

NO	OUTPUT RKAKL	TARGET	ALOKASI
1	Meningkatnya Pelayanan Kekeantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah		Rp. 1.887.051.000
	a. Indeks deteksi faktor risiko di pintu masuk Negara	0,93	Rp. 1.373.390.000
	b. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	100%	Rp. 478.101.000
	c. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	0,98	Rp. 35.560.000
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		Rp. 11.432.539.000
	a. Nilai kinerja anggaran	85	Rp. 6.484.714.000
	b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93	Rp. 4.329.908.000
	c. Kinerja implementasi WBK satker	75	Rp. 75.863.000
	d. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	68%	Rp. 542.054.000
	Total		Rp. 13.319.590.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran dan analisis terhadap pencapaian kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke dilaksanakan setiap akhir tahun pelaksanaan kegiatan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan alat ukur berupa indikator yang ditetapkan dalam penetapan kinerja yang dapat mengukur keberhasilan serta kegagalan sasaran dan tujuan organisasi. Pengukuran keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang tercantum pada indikator. Selain itu pengukuran dilakukan dengan membandingkan capaian indikator kinerja tahun berjalan dengan tahun lalu.

Penetapan indikator kinerja memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang akan diukur secara kuantitatif dan kualitatif sebagai penentuan tercapainya tujuan organisasi. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke melaksanakan proses penetapan kinerja sebagai salah satu bentuk penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran target-target penetapan kinerja untuk mengetahui tingkat capaian kinerja yang dituangkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke. Diperlukan analisis untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung dalam tercapainya kinerja setiap indikator, faktor penghambat dan pendukung yang telah teridentifikasi kemudian dicarikan usulan pemecahan masalah untuk pengambilan keputusan agar tidak terulang kembali di tahun mendatang.

1. Capaian Kinerja Tahun 2022

Persentase Capaian kinerja tahun 2022 dapat dilihat dengan membandingkan antara capaian kinerja yang diperoleh dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke dengan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdapat dua sasaran yang harus dicapai yaitu meningkatnya kekarantinaan di pintu masuk dan wilayah dan meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit. Sasaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke dan indikatornya adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah
 1. Indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk negara
 2. Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang

dan lingkungan

3. Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk Negara
- b. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
1. Nilai kinerja anggaran
 2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
 3. Kinerja implementasi WBK satker
 4. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

Capaian kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6 Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2022

No	SASARAN	INDIKATOR		TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	Meningkatnya Pelayanan Kekearifan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1	Indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk negara	0,93	0,98	105%
		2	Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	100%	100%	100%
		3	Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara	0,98	0,90	92%
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4	Nilai kinerja anggaran	85	88	104%
		5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93	89	96%
		6	Kinerja implementasi WBK satker	75	72,31	96%
		7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	68%	79	116%
Rata-rata persentase capaian target						101%

Pengukuran kinerja setiap indikator, keberhasilan dan kegagalan dapat dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara

a. Pengertian

Pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap orang, alat angkut, barang dan lingkungan untuk menentukan ada tidaknya risiko kesehatan masyarakat atau risiko penularan penyakit

b. Defenisi Operasional

Status kinerja deteksi dini faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN berdasarkan hasil pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang dilakukan dalam satu tahun.

c. Rumus/Cara perhitungan

Rumus

$$indeks = \frac{S}{(S_{max} - S_{min})}$$

S = score

S_{max} = score maksimal

S_{min} = score minimal

- Score dihitung dari bobot x cakupan (coverage)
- Score maksimal dihitung dari bobot x cakupan maksimal (coverage max)
- Score minimal dihitung dari bobot x cakupan minimal (coverage min)

Terdapat 4 parameter dimensi dasar perhitungan indeks deteksi dini faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN yakni :

- i. Presentasi orang yang diperiksa sesuai standar.
- ii. Presentasi alat angkut yang diperiksa sesuai standar.
- iii. Presentasi barang yang diperiksa sesuai standar.
- iv. Presentasi lingkungan yang diperiksa sesuai standar.

Aspek yang dapat diukur di KKP Kelas III Merauke dapat dilihat pada tabel :

Tabel 7 Parameter Pengukuran Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara

Parameter Pemeriksaan	Bandara	Pelabuhan/	PLBN	Masyarakat di wilayah pelabuhan, bandara dan PLBN
Orang (setiap orang dihitung 1 kali pemeriksaan)	Rekap laporan harian penumpang datang dan berangkat penumpang LN / DN yang menggunakan pesawat, Data kunjungan poliklinik bukan penumpang	Rekap laporan harian penumpang datang dan berangkat penumpang LN / DN yang menggunakan kapal, Data kunjungan poliklinik bukan penumpang, pengujian kesehatan ABK,	Rekap Laporan Harian Pengawasan Pelintas Batas WNA, Data kunjungan poliklinik bukan pelintas batas,	Skринing HIV, TB, dan malaria bagi masyarakat
Alat Angkut (pesawat dan kapal)	Rekap laporan Gendec	COP dan PHQC		
Barang (Jenazah)	Ijin angkut jenazah	Ijin angkut jenazah		
Lingkungan (TTU, TPM, Air, vektor)	Jumlah Form Inspeksi Kesehatan Lingkungan TTU, Jumlah Form Inspeksi Kesehatan Lingkungan Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Jumlah Form	Jumlah Form Inspeksi Kesehatan Lingkungan TTU, Jumlah Form Inspeksi Kesehatan Lingkungan Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Jumlah Form	Jumlah Form Inspeksi Kesehatan Lingkungan TTU, Jumlah Form Inspeksi Kesehatan Lingkungan Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Jumlah Form	

	Inspeksi Kesehatan Lingkungan Pengawasan sarana air bersih (ISPAB), Jumlah Form Inspeksi Kesehatan Lingkungan Air (Lokus), Jumlah Rekapitulasi hasil survei vektor	Inspeksi Kesehatan Lingkungan Pengawasan sarana air bersih (ISPAB), Jumlah Form Inspeksi Kesehatan Lingkungan Air (Lokus), Jumlah Rekapitulasi hasil survei vektor	Inspeksi Kesehatan Lingkungan Pengawasan sarana air bersih (ISPAB), Jumlah Form Inspeksi Kesehatan Lingkungan Air (Lokus), Jumlah Rekapitulasi hasil survei vector	
--	--	--	--	--

d. Capaian indikator

Pada pertengahan tahun 2022, indikator mengalami perubahan karena adanya adanya reuiu SAKIP oleh Inspektorat Jenderal Kemenkes yang menyatakan bahwa :

1. Indikator pada Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan dengan Dirjen P2P tidak SMART khususnya pada specific :
 - Indikator Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan
 - Ada pengulangan indikator 1 (jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan). dan indikator 2 (Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan)
2. Indikator masih bersifat proses
3. Pemahaman persepsi indikator dan sumber data setiap KKP tidak sama

Meskipun indikator ini mengalami perubahan, tetapi parameter yang diukur tetap menggunakan parameter yang sama dengan tahun sebelumnya. Perbedaan indikator ini dengan tahun sebelumnya hanya terletak pada cara pengukurannya saja. Adapun capaian indikator indeks pengendalian factor risiko di pintu masuk negara adalah sebagai berikut :

Tabel 8

Target dan Capaian Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara

Indikator kinerja	Target		Realiasi		%
					Capaian
Indeks deteksi faktor risiko di pintu masuk negara	0,93	Indeks	0,98	Indeks	105

Berdasarkan tabel 8 dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan untuk indikator

Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara sebesar 0,98 atau 105% . Hal ini menunjukkan bahwa capaian untuk indikator Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara telah melampaui target yang ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022. .dapat dilihat bahwa capaian target .

e. Perbandingan capaian indikator

1) Perbandingan capaian target dengan tahun sebelumnya

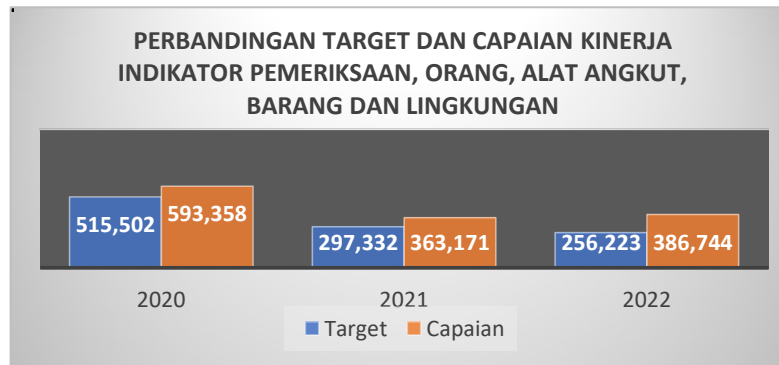
Tabel 9

Perbandingan capaian target dengan tahun sebelumnya

No	Indikator	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	515502	593358	115%	297332	363171	119%	256223	383744	150%
	Indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk negara							0,93	0,98	105%

Grafik 6

Capaian target indikator pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dibandingkan dengan tahun sebelumnya



Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat dilihat bahwa persentase pencapaian target indikator jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan pada tahun 2020 sebesar 115%, tahun 2021 sebesar 119 % dan tahun 2022 sebesar 150 %. Persentase capaian target indikator indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara pada tahun 2022 Pencapaian target tahun 2022 lebih tinggi dari tahun sebelumnya karena pada tahun 2022 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat mulai dilonggarkan dan pintu masuk di Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN) Sota dibuka kembali yang mengakibatkan lalu lintas orang, barang dan alat angkut di

Pelabuhan, Bandara dan PLBN semakin meningkat.

2) Perbandingan capaian target dengan target RAK 2020-2024

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga dari RAK KKP Kelas III Merauke 2020-2024. Capaian indikator indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara jika dibandingkan dengan RAK dapat dilihat pada tabel :

Tabel 10

Perbandingan capaian target 2022 dengan target tahun 2023 dan 2024

No	Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023	Tahun 2024
		Target	Capaian	%	Target	Target
1	Indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk negara	0,93	0,98	105%	0,99	0,99

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target pada tahun 2023 dan 2024 lebih tinggi dibandingkan target tahun 2022 dengan pertimbangan bahwa pada tahun 2023 dan 2024 kasus Covid 19 semakin melandai/berkurang, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dicabut pada bulan Desember tahun 2022 sehingga diperkirakan jumlah alat angkut, orang dan barang yang masuk di pintu masuk semakin meningkat yang mengakibatkan indeks deteksi faktor risiko di pintu masuk negara semakin meningkat dibanding tahun 2022

3) Perbandingan capaian target dengan standar nasional

Indeks deteksi faktor risiko di pintu masuk negara merupakan indikator untuk mendukung pencapaian kinerja eselon 1 terkait persentase faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan dengan target 93% pada tahun 2022. Dengan realisasi indikator indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara sebesar 0,98 (tercapai 105%), KKP Kelas III Merauke telah mendukung pencapaian kinerja eselon 1 sebagai salah satu satker dari Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

3) Perbandingan capaian target dengan KKP Kelas II Kupang, KKP Kelas II Jayapura dan KKP Kelas III Sampit

Tabel 11

Capaian target indikator pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dibandingkan dengan KKP Kelas II Kupang, KKP Kelas II Jayapura dan KKP Kelas III Sampit.

INDIKATOR	TAHUN 2022 KKP MERAUKE			TAHUN 2022 KKP KELAS II KUPANG			TAHUN 2022 KKP KELAS II JAYAPURA			TAHUN 2022 KKP KELAS III SAMPIT		
	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE CAPAIAN TARGET	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE CAPAIAN TARGET	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE CAPAIAN TARGET	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE CAPAIAN TARGET
Faktor Risiko yang Ditemukan dan Dikendalikan	0.93	0.98	105%	0.93%	0.95	102%	0.84	0.97	116%	0.91	0.92	101%

Dari tabel dapat dilihat bahwa persentase capaian target indikator indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara KKP Kelas III Merauke 105%, KKP Kelas III Kupang sebesar 102%, KKP Kelas II Jayapura sebesar 116% dan KKP Kelas III Sampit 101%. Capaian indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara KKP Kelas III Merauke, KKP Kelas II Kupang, KKP Kelas II Jayapura dan KKP Kelas III Sampit melebihi target yang telah ditentukan dalam perjanjian kinerja.

f. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator

- 1) Berkoordinasi dengan lintas sektor dan lintas program terkait baik secara langsung maupun dengan memanfaatkan media komunikasi online seperti *Whatsapp* Grup agar pertukaran informasi dapat berlangsung dalam waktu yang realtif singkat, sehingga tim pengawasan lalu lintas orang, barang dan alat angkut KKP Merauke selalu dapat mempersiapkan diri dalam hal tugas pengawasan dan pemeriksaan yang akan dilakukan.
- 2) Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan setiap minggu melalui briefing pagi untuk membahas permasalahan yang dihadapi dalam melakukan pengawasan orang, barang, alat angkut dan lingkungan di pintu masuk.

g. Analisa penyebab keberhasilan

Persentase capaian indikator indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara tahun 2022 melebihi target dengan capaian indeks 0,98 (105%). Penyebab keberhasilan adalah :

- 1) Dukungan dan Kerjasama dari pihak pemerintah daerah, lintas program, lintas sektor dan para mitra kerja.
- 2) Adanya payung hukum dan pedoman yang jelas tentang kegiatan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk negara

Adanya media komunikasi online untuk mempermudah komunikasi dengan pengguna jasa

- 3) Kesiapan pegawai dalam melakukan pengawasan alat angkut, orang dan barang terutama jika terjadi perubahan jadwal kedatangan kapal (pengaruh cuaca)
- 4) Tersedianya anggaran, sarana dan prasarana, SDM yang berkompeten walaupun dari segi kuantitas belum memadai.

h. Kendala/masalah yang dihadapi

- 1) Jadwal kedatangan/keberangkatan kapal tidak menentu/ sering berubah karena tergantung pada pasang surut air
- 2) Jadwal kedatangan/keberangkatan pesawat perintis tergantung kondisi cuaca dan keamanan di daerah Merauke
- 3) Adanya perbedaan data manifest dari agen pelayaran dengan hasil pengawasan yang dilakukan karena beberapa penumpang naik/turun tidak membeli tiket (tidak mampu secara ekonomi).
- 4) Pada awal tahun 2022, terdapat syarat bagi pelaku perjalanan untuk memenuhi surat keterangan bebas COVID-19 dengan Pemeriksaan PCR bagi masyarakat yang belum memiliki status vaksinasi dosis lengkap, sedangkan pemeriksaan PCR di RSUD hanya dilakukan pada hari Senin, Rabu dan Jumat saja, sehingga beberapa pelaku perjalanan yang harus berangkat secara tiba-tiba tdk dapat melakukan pemeriksaan PCR
- 5) Pada Pertengahan tahun 2022, terdapat perubahan syarat pelaku perjalanan yaitu harus memenuhi status vaksinasi, sedangkan ketersediaan vaksin di Merauke belum dapat memenuhi kebutuhan jumlah masyarakat Merauke.

i. Pemecahan Masalah

- 1) Menyiapkan team petugas clearance in/out yang standby untukantisipasi kapal yang berubah sewaktu-waktu
- 2) Memberikan usul ke pihak Pemda Kab. Merauke agar fasyankes dapat melakukan pemeriksaan PCR setiap hari
- 3) Memberikan edukasi kepada masyarakat agar memenuhi status vaksinasinya sebagai syarat pelaku perjalanan
- 4) Mengusulkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke untuk dapat mendorong usulan kebutuhan logistik vaksin kepada pemerintah pusat.

j. Efisiensi penggunaan sumber daya

- 1) **Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran**

Tabel 12
Realisasi anggaran indikator
indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara

No	Uraian Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
1	Rapat Koordinasi Dalam Kantor Pelaksanaan Kekerantinaan di Pintu Masuk dan Desiminasi Hasil Surveilans	Rp 87,484,000	Rp 85,850,117	Rp 1,633,883
2	Konsultasi Pelaksanaan Program P2P ke Pusat	Rp 86,676,000	Rp 85,348,047	Rp 1,327,953
3	Pelayanan Kesehatan Pada Situasi Khusus (Event Nasional/Internasional, Keagamaan diluar Perimeter dan Buffer)	Rp 18,103,000	Rp 16,523,000	Rp 1,580,000
4	Pelaksanaan Mobile Vaksin Covid-19	Rp 14,109,000	Rp 14,084,000	Rp 25,000
5	Pelayanan Rujukan Kurang dari 8 Jam	Rp 6,720,000	Rp 6,719,800	Rp 200
6	Pemeriksaan Kesehatan Penjamah Makanan di Wilayah Kerja	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	Rp -
7	Pemeriksaan Sanitasi Lingkungan Pelabuhan, Bandara dan PLBD (Kualitas air, Makanan, limbah, Udara, Sanitasi Gedung Bangunan) Wilayah Kerja	Rp 22,000,000	Rp 22,000,000	Rp -
8	Pengawasan/Pemeriksaan Sampel Makanan dan Minuman (Wilayah Kerja, Pelaksanaan Pra Embarkasi dan Debarkasi)	Rp 78,656,000	Rp 74,502,952	Rp 4,153,048
9	Uji Resistensi Insectisida	Rp 105,579,000	Rp 78,263,400	Rp 27,315,600
10	Pemeriksaan Alat Angkut, Orang dan Barang pada situasi KLB, Wabah/KKM	Rp 226,200,000	Rp 219,147,702	Rp 7,052,298
11	Pelaksanaan kekarantinaan kesehatan di bandara	Rp 62,400,000	Rp 56,349,600	Rp 6,050,400
12	Layanan kekarantinaan kesehatan di PLBD	Rp 19,200,000	Rp 8,600,000	Rp 10,600,000
13	Layanan Kekarantinaan Kesehatan Pada Situasi Khusus	Rp 87,300,000	Rp 87,270,000	Rp 30,000
14	Layanan survei faktor risiko penyakit pes	Rp 92,628,000	Rp 92,572,500	Rp 55,500
15	Layanan survei faktor risiko penyakit DBD	Rp 46,080,000	Rp 46,080,000	Rp -
16	Layanan survei faktor risiko penyakit malaria	Rp 80,304,000	Rp 80,304,000	Rp -
17	Layanan survei faktor risiko penyakit diare	Rp 15,360,000	Rp 14,760,000	Rp 600,000
18	Layanan survei faktor risiko penyakit HIV/AIDS	Rp 15,125,000	Rp 15,081,375	Rp 43,625
19	Layanan survei faktor risiko penyakit TB	Rp 91,100,000	Rp 90,775,050	Rp 324,950
20	Layanan Kegawatdaruratan dan rujukan (katagori II)	Rp 4,475,000	Rp 1,325,000	Rp 3,150,000
21	Layanan penemuan aktif surveilans migrasi malaria	Rp 20,880,000	Rp 20,840,000	Rp 40,000
22	Pengadaan Alat dan bahan Medis dan Non Medis untuk pelayanan kesehatan	Rp 176,011,000	Rp 175,949,955	Rp 61,045
23	Cetak Formulir Pemeriksaan Orang, Barang dan Alat Angkut (Form SSCEC, HAC, COP, P3K, FORM Surveilans/PE, Form Migrasi Malaria, HIV, TBC)	Rp 16,000,000	Rp 16,000,000	Rp -
Total		Rp 1,373,390,000	Rp 1,309,346,498	Rp 64,043,502

$$CKi = 95\% (0,95)$$

$$\text{Efisiensi} = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKixCKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = \frac{((1.373.390.000 \times 0.95) - 1.309.346.498)}{1.373.390.000 \times 0.95} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = 4,89\% (0,05)$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{4,89\%}{20} \times 50\right)$$

$$NE = 50\% + (4,89 \times 2,5)$$

$$NE = 50\% + 12,23\%$$

NE = 62,23%

Dari hasil perhitungan realisasi anggaran indikator persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan diperoleh hasil ,0,05 artinya tidak efisien karena realisasi anggaran lebih besar dari pada capaian kinerja menunjukkan hasil efisien.

2) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Dengan jumlah personel yang ada (tenaga ASN maupun Non ASN), semua kegiatan yang mendukung indikator indeks pengendalian factor risiko di pintu masuk negara tetap terlaksana dengan baik dan tercapai melebihi target. Sumber Daya Manusia KKP Merauke sebanyak 56 orang yang terdiri dari ASN sebanyak 34 orang, dan tenaga Non ASN sebanyak 22 orang. Terdapat pengaturan harian berupa penjadwalan dari setiap substansi yaitu PKSE, PRL dan KLW, dan TU sehingga terbentuk tim kerja lapangan untuk setiap tugas yang diberikan. Kemudian untuk pengaturan SDM di wilayah kerja, di berikan bimbingan teknis atau arahan untuk dapat melaksanakan tugas pokok fungsi KKP di wilayah kerja, contohnya tenaga teknis dengan *basic surveilans* juga mengerjakan pengawasan lingkungan, sehingga seluruh tugas pokok fungsi terlaksana.

2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan

a. Pengertian

Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan adalah penemuan adanya faktor risiko penyakit yang dilakukan dari hasil pemeriksaan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dan dikendalikan untuk dapat mencegah terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Dunia (KKMD)

b. Defenisi Operasional

Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dalam satu tahun

c. Rumus/Cara perhitungan

Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dibagi dengan jumlah faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dikali 100%.

Tabel 13.
Parameter Faktor Risiko yang Dikendalikan
di KKP Kelas II Merauke Tahun 2022

PEMERIKSAAN	FR DITEMUKAN	FR DIKENDALIKAN
Orang	<ul style="list-style-type: none"> • Penumpang dengan suhu >37,5° • Pelaku perjalanan yang dipersyaratkan hasil Antigen Covid-19 Positif • Penumpang dengan Saturasi Oksigen <95% • Ibu hamil usia>32 minggu • Ibu hamil usia<14 minggu • Ibu Hamil usia >26 minggu • Kadar Hb <8.5 gr/dL • Penumpang dengan penyakit menular yang menimbulkan wabah • Penumpang yang belum vaksin Meningitis • Penumpang dengan ICV palsu/ Expire • Jumlah penumpang HIV Positif • Jumlah penumpang TB Positif • Jumlah penumpang Malaria Positif • Pelaku perjalanan tanpa vaksinasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Rujukan • Isolasi • Tolak berangkat • vaksinasi (tidak termasuk Covid) • pertolongan gawat darurat • ijin angkut orang sakit • surat layak terbang bagi ibu hamil yang beresiko • rekomendasi perjalanan (clearance untuk orang selesai karantina)
Alat Angkut	<ul style="list-style-type: none"> • Ditemukannya vektor (kecoa, lalat, nyamuk) dan BPP pada alat angkut • Ditemukannya penumpang Positif 	<ul style="list-style-type: none"> • SSCC (desinfeksi, desinseksi, deratisasi, desinfeksi, dekontaminasi) • surat bebas karantina kapal • laporan desinseksi pesawat • one month extention
Barang	<ul style="list-style-type: none"> • Jenazah penyakit menular dan potensial wabah (meningitis, covid, TB) 	<ul style="list-style-type: none"> • Jenazah tidak diberangkatkan atau tunda keberangkatan sampai dokumen lengkap.
Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan TPM (fisik, E-Coli, MPN Coliform, ALT untuk usap alat makan dan masak) • Pemeriksaan Air yang tidak memenuhi syarat (E-Coli, MPN Coliform, risiko pencemaran tinggi dan amat tinggi) • Pengendalian DBD 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengedukasi penjamah makanan yang hasil pemeriksaan usap alat makan dan usap tangan penjamah makanan tdk hygiene agar selalu memperhatikan kebersihan alat makan dan kebersihan tangan dalam menyajikan makanan. • Air yang memenuhi syarat dari yang sebelumnya tidak memenuhi syarat, • House index perimeter >0 dilakukan tindakan pengendalian vector DBD yaitu fase larva dengan larvasida dan nyamuk dewasa Aedes,sp melalui tindakan pengasapan (fogging dan pengkabutan (ULV)

d. Capaian Indikator faktor risiko yang ditemukan dan dikendalikan

Tabel 14
Faktor Risiko yang Ditemukan dan Dikendalikan

NO	FAKTOR RISIKO	JUMLAH YANG DIPERIKSA	JUMLAH FAKTOR RISIKO YANG DITEMUKAN	JUMLAH FAKTOR RISIKO YANG DIKENDALIKAN	PERSENTASE
1	Pemeriksaan Orang	376,938	186	186	100%
2	Pemeriksaan alat angkut	4,505	0	0	100%
3	Pemeriksaan barang	255	0	0	100%
4	Pemeriksaan lingkungan	2,046	46	46	100%
	Jumlah	383.744	232	232	100%

e. Perbandingan capaian target indikator

1) Perbandingan capaian target dengan tahun sebelumnya

Tabel 15
Faktor risiko yang ditemukan dan dikendalikan
dibandingkan dengan tahun sebelumnya

INDIKATOR	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022		
	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE
Faktor risiko yang ditemukan dan dikendalikan	90%	99,75%	112%	95%	100%	105%	100%	100%	100%

Dari tabel dapat dilihat bahwa :

- Capaian persentase faktor risiko yang ditemukan dan dikendalikan tahun 2022 sebesar 100 % dari target sebesar 100 % dan menghasilkan presentase capaian target sebesar 100%
- Capaian persentase faktor risiko yang ditemukan dan dikendalikan pada tahun 2022 sebanyak 100% lebih rendah dari capaian tahun 2021 sebanyak 105%, hal ini disebabkan karena target tahun 2022 (100%) lebih besar dari target 2021 (95%)

2) Perbandingan capaian target dengan Renstra (RAK 2020-2024)

Tabel 16
Faktor Risiko yang ditemukan dan Dikendalikan dibandingkan dengan Target tahun 2022- 2024

INDIKATOR	TAHUN 2022			TARGET 2023	TARGET 2024
	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE		
Faktor risiko yang ditemukan dan dikendalikan	100%	100%	100%	100%	100%

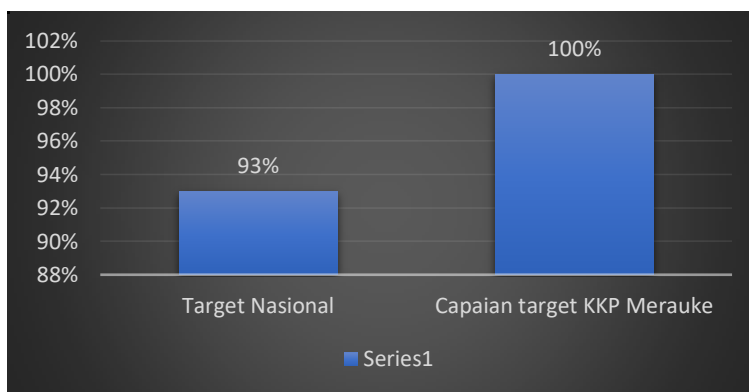
Target faktor risiko yang ditemukan dan dikendalikan tahun 2022 sebesar 100%, target tahun 2023 sebesar 100% dan target tahun 2024 sebesar 100%. Setiap tahun target dipertahankan dengan tujuan agar mendorong kinerja KKP Merauke semakin meningkat dalam mengendalikan faktor risiko penyakit di pintu masuk.

3) Perbandingan capaian target tahun 2022 dengan standar nasional

Perbandingan capaian target tahun 2022 dengan standar nasional dapat dilihat pada :

Grafik 7.

Perbandingan capaian target tahun 2022 dengan standar nasional



Dari grafik dapat dilihat bahwa target yang terdapat dalam dokumen Renstra Kemenkes dan Rencana Aksi Program (RAP) Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020-2024 untuk Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada tahun 2022 adalah sebesar 93%. Adapun capaian Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke untuk persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan adalah 100%. Capaian tersebut melampaui target Nasional.

4) Capaian target indikator faktor risiko yang ditemukan dan dikendalikan dibandingkan dengan KKP Kelas III Kupang, KKP Kelas II Jayapura dan KKP Kelas III Sampit

Tabel 17
Capaian target indikator faktor risiko yang ditemukan dan dikendalikan dibandingkan dengan KKP Kelas III Kupang, KKP Kelas II Jayapura dan KKP Kelas III Sampit

INDIKATOR	TAHUN 2022 KKP MERAUKE			TAHUN 2022 KKP KUPANG			TAHUN 2022 KKP JAYAPURA			TAHUN 2022 KKP SAMPIT		
	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE CAPAIAN TARGET	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE CAPAIAN TARGET	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE CAPAIAN TARGET	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE CAPAIAN TARGET
Faktor Risiko yang Ditemukan dan Dikendalikan	100%	100%	100%	97%	100%	103%	97%	99%	102%	97%	100%	103%

Dari tabel dapat dilihat bahwa persentase capaian target indikator faktor risiko yang ditemukan dan dikendalikan oleh KKP Kelas III Merauke sebesar 100% (dari target 100%), KKP Kelas II Kupang sebesar 103% (dari target 97%), KKP Kelas II Jayapura sebesar 102% (dari target 97%) dan KKP Kelas III

Sampit 103%. (dari target 97%)

f. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator

- 1) Melakukan skrining penyakit secara rutin dan berkelanjutan di pintu masuk
- 2) Memfasilitasi sarana dan prasarana (alat kesehatan dan bahan habis pakai) kesehatan untuk mendukung pemeriksaan pelaku perjalanan
- 3) Presentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada lingkungan:
 - Larvasida dan Pemberantasan Sarang Nyamuk
 - Pengendalian vektor DBD melalui fogging dan pengkabutan
 - Pengendalian vektor malaria melalui tindakan IRS
 - Pengendalian vektor diare.
 - Edukasi kepada pemilik Tempat Pengolahan Pangan
 - Desinfeksi alat angkut
 - Desinseksi alat angkut

g. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan pengendalian faktor risiko di pintu masuk dicapai dengan adanya dukungan dari lintas sektor dan lintas program di wilayah kerja dan kesigapan petugas dalam melaksanakan kegiatan pengawasan faktor risiko penyakit di pintu masuk

h. Kendala/masalah yang dihadapi

- 1) Beberapa jenazah yang diangkut dari kabupaten lain dan transit di Merauke tidak memenuhi syarat pemetian sehingga harus dilaksanakan pemetian kembali di Kabupaten Merauke
- 2) Beberapa kegiatan rujukan dari daerah perifer menuju Merauke tidak terkoordinir dengan baik karena sulitnya sinyal komunikasi kepada petugas KKP, sehingga terdapat beberapa pasien dengan diagnosa suspek penyakit menular seperti TB paru yang dirujuk.

i. Pemecahan Masalah

- a) Menyampaikan permasalahan secara lisan kepada pihak pengelola bandara dalam rapat evaluasi bandara sehat.
- b) Melakukan sosialisasi kepada pihak maskapai, dinas kesehatan, Rumah sakit dan fasyankes tentang tatacara pemetian jenazah yang akan diangkut
- c) Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi dengan pihak Maskapai mengenai layanan rujukan di pintu masuk dan melakukan tindakan pengawasan desinfeksi terhadap alat angkut (pesawat/ kapal) dan mobil ambulance yang dipakai untuk mengangkut pasien dengan suspek penyakit menular.

j. Efisiensi penggunaan sumber daya

1) Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran

Realisasi anggaran indikator persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang ditemukan dan dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dapat dilihat pada tabel:

Tabel 18
Realisasi anggaran indikator persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang ditemukan dan dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan

No	Uraian Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
1	Rapat Dalam Kantor dengan LS/LP Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Risiko Lingkungan	Rp 7,800,000	Rp 7,800,000	Rp -
2	Survei dan Pengendalian Vektor dan BPP	Rp 142,955,000	Rp 141,344,460	Rp 1,610,540
3	Tindakan Pengendalian Faktor Risiko Alat Angkut, Orang dan barang (Isolasi, Deratisasi, Dedinfeksi)	Rp 2,250,000	Rp -	Rp 2,250,000
4	pengendalian vektor DBD	Rp 42,440,000	Rp 42,204,647	Rp 235,353
5	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare	Rp 20,784,000	Rp 16,734,000	Rp 4,050,000
6	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria	Rp 22,086,000	Rp 19,260,000	Rp 2,826,000
7	Pengadaan Alat dan bahan pengawasan vektor	Rp 202,194,000	Rp 199,521,163	Rp 2,672,837
8	Pemeliharaan Peralatan Teknis	Rp 37,592,000	Rp 22,417,668	Rp 15,174,332
Total		Rp 478,101,000	Rp 449,281,938	Rp 28,819,062

$$CKi = 94\% (0.94)$$

$$\text{Efisiensi} = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = \frac{1((478.101.000 \times 0.94) - 449.281.938)}{478.101.000 \times 0.94} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = 6,41\% (0,1)$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{6,41\%}{20} \times 50\right)$$

$$NE = 50\% + 16,01\%$$

$$NE = 66,01\%$$

Dari hasil perhitungan realisasi anggaran indikator persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan diperoleh hasil 0,1 artinya tidak efisien karena realisasi anggaran lebih besar dari pada capaian kinerja

2) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Dengan jumlah personel yang ada (tenaga ASN maupun Honorer), semua kegiatan yang mendukung indikator pengendalian

faktor risiko yang ditemukan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan tetap terlaksana dengan baik dan tercapai melebihi target. Sumber Daya Manusia KKP Merauke sebanyak 56 orang yang terdiri dari ASN sebanyak 34 orang, dan tenaga honorer sebanyak 22 orang. Terdapat pengaturan harian berupa penjadwalan dari setiap substansi yaitu PKSE, PRL dan KLW, dan TU sehingga terbentuk tim kerja lapangan untuk setiap tugas yang diberikan. Kemudian untuk pengaturan SDM di wilayah kerja, di berikan bimbingan teknis atau arahan untuk dapat melaksanakan tugas pokok fungsi KKP di wilayah kerja, contohnya tenaga teknis dengan *basic* kesehatan lingkungan juga mengerjakan pengawasan factor risiko penyakit menular lewat pengukuran suhu penumpang di pintu masuk, sehingga seluruh tugas pokok fungsi terlaksana.

3. Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara

a. Pengertian

Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara adalah nilai yang menunjukkan besaran risiko penyakit di pintu masuk negara

b. Defenisi Operasional

Status faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan dalam satu tahun.

c. Rumus/Cara perhitungan

Rumus:

$$indeks = \frac{S}{(S_{max} - S_{min})}$$

- Score dihitung dari bobot x cakupan (coverage)
- Score maksimal dihitung dari bobot x cakupan maksimal (coverage max)
- Score minimal dihitung dari bobot x cakupan minimal (coverage min)

Parameter perhitungan terdiri dari:

- a) Jumlah sinyal SKD KLB dan bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80 %
- b) Indeks pinjal ≤ 1
- c) Tidak ditemukan larva anopheles
- d) Indeks populasi kecoa < 2
- e) Indeks populasi lalat ≤ 2
- f) HI Perimeter = 0
- g) HI Buffer = < 1

- h) TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan
- i) TPP laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan
- j) Kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali

Kesebelas persentasi parameter dijumlahkan dan dibagi 11 dikali 100%

d. Capaian target indikator

Capaian indikator indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara dapat dilihat pada tabel :

Tabel 19
Persentase Parameter Indeks Pengendalian Faktor Risiko
di Pintu Masuk Negara

INDIKATOR	CARA HITUNG	TARGET 2022	CAPAIAN 2022	PERSENTASE
Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara	Jumlah capaian indikator	95%	154 %	162%
	Persentase Sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%	100%	100%	100%
	Persentase bandara/ pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1	45	55	122%
	Persentase bandara/ pelabuhan dengan Tidak ditemukan larva anopheles (<1)	60	81	135%
	Persentase bandara/ pelabuhan dengan Indeks Populasi Kecoa<2	60	19	32%
	Persentase bandara/ pelabuhan dengan Indeks Populasi Lalat<2	60	43	72%
	Persentase bandara/ pelabuhan dengan HI perimeter = 0	60	84	140%
	Persentase bandara/ pelabuhan dengan HI buffer <1	12	20	167%
	Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan	120	398	332%
	Persentase lokus TTU laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan	90	116	129%
	Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/ bakteriologis	1032	990	96%

Dari parameter yang ada diperoleh nilai indeks sebesar 0,90 dari target 0,98 (92%)

e. Perbandingan capaian target indikator

1) Perbandingan dengan tahun sebelumnya

Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel :

Tabel 20

Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara
Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	85%	96,60%	113,65%	90%	106%	118%	0,98	0,90	92%

2) Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara yang dibandingkan dengan Renstra (RAK 2020-2024)

Tabel 21

Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara
yang Dibandingkan dengan Tahun 2022, 2023 dan 2024

Indikator	Tahun 2022			Target Indeks Tahun 2023	Target Indeks Tahun 2024
	Target	Capaian	Persentase		
Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	0,98	0,90	87,7%	0,92	0,92

Dari tabel dapat dilihat bahwa terjadi penurunan target di tahun 2023 dan tahun 2024, hal ini disebabkan karena tahun 2022 target indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara, hal ini disebabkan karena capaian di tahun 2022 tidak dapat mencapai target indeks sebesar 0,98, oleh sebab itu target di tahun 2023 dan 2024 menjadi indeks 0,92

3) **Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara yang dibandingkan dengan KKP Kelas II Kupang, KKP Kelas II Jayapura dan KKP Kelas III Sampit.**

Tabel 22

Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara dibandingkan dengan KKP Kelas II Kupang, KKP Kelas II Jayapura dan KKP Kelas III Sampit

Indikator	Definisi Operasional Indikator	KKP Kelas III Merauke			KKP Kelas III Kupang			KKP Kelas II Jayapura			KKP Kelas III Sampit		
		Target	Capaian	Persentase Kinerja	Target	Capaian	Persentase Kinerja	Target	Capaian	Persentase Kinerja	Target	Capaian	Persentase Kinerja
Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara	Status faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan dalam satu tahun	0.98	0.90	92%	0.95	0.80	84%	0.85	0.98	115%	0.93	0.94	101%

Persentase capaian Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara KKP Kelas III Merauke sebesar 92%, lebih tinggi dibandingkan dengan capaian KKP Kelas II Kupang yaitu 84%% dan lebih rendah dibandingkan dengan capaian target KKP Kelas II Jayapura 115% dan KKP Kelas II Sampit 101%

f. **Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator**

- 1) Membuat jejaring informasi dalam rangka cepat tanggap respon SKD KLB
- 2) Indeks Pinjal <1

Berdasarkan hasil perhitungan capaian indikator Indeks Pinjal tahun 2021 tidak ditemukan pinjal *Xenopsylla cheopis* dan pinjal lainnya upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator adalah :

- Edukasi kepada pemilik sarana dipelabuhan, Bandar Udara dan PLBN untuk memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar
- Mengimbau kepada masyarakat sekitar dan pengunjung pelabuhan, Bandar Udara dan PLBN agar membuang sampah pada tempat yang telah disediakan
- Pengangkutan sampah secara rutin setiap hari
- Melakukan pemasangan perangkap untuk mengendalikan populasi tikus

- 3) Tidak ditemukan larva *anopheles*

Berdasarkan hasil perhitungan capaian Survei larva *Anopheles* pada tempat perindukan terdapat satu wilayah kerja ditemukan habitat larva *Anopheles*,

upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator adalah :

- Suvei habitat larva *Anopheles* dan nyamuk dewasa
- Melakukan IRS
- Melakukan larvasida
- Memelihara ikan pemakan jentik

4) Indeks Kepadatan kecoak <2

Berdasarkan hasil perhitungan capaian kepadatan Kecoak tidak ditemukan angka kepadatan > 2, upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator adalah

- Survei Kecoak
- Perbaiki sanitasi lingkungan
- Edukasi kepada masyarakat untuk memelihara kebersihan lingkungan
- Masyarakat dan pemilik sarana melakukan pengendalian kecoak secara mandiri

5) Indeks kepadatan lalat < 2

Berdasarkan hasil perhitungan capaian indikator kepadatan lalat adalah 60%, upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator adalah :

- Melakukan survei vektor diare setiap bulan
- Melakukan pengendalian untuk menekan populasi lalat
- Mengimbau kepada masyarakat sekitar dan pengunjung pelabuhan, Bandar Udara dan PLBN agar membuang sampah pada tempat yang telah disediakan

6) TTU Memenuhi syarat

Berdasarkan hasil perhitungan capaian indikator TTU Memenuhi syarat adalah 295%, upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator adalah :

- Melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap TTU
- Berkoordinasi dengan stake holder untuk menyiapkan sarana dan prasarana TTU yang memenuhi syarat kesehatan
- Pengguna TTU untuk memelihara dan menjaga kebersihan

7) TPP Laik Hygiene

Berdasarkan hasil perhitungan capaian indikator TPP Laik Hygiene adalah 53%, upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator adalah :

- Melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap TPP
- Memberikan edukasi kepada pemilik Penjamah Makanan untuk menerapkan prinsip Hygiene sanitasi makanan
- Menyarankan kepada pemilik dan pengelola untuk menyediakan fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat.

8) Kualitas air bersih memenuhi syarat

Berdasarkan hasil perhitungan capaian indikator Kualitas air bersih diperoleh hasil 85% yang memenuhi syarat, upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator adalah :

- Melakukan pemeriksaan secara rutin
- Edukasi kepada pengelola untuk menyiapkan sarana air bersih yang memenuhi syarat

g. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Analisa penyebab keberhasilan adalah :

- 1) Kerjasama dan koordinasi yang baik dengan lintas sektor dan lintas program
- 2) Desiminasi informasi hasil kegiatan kepada instansi terkait.
- 3) Menyediakan media KIE di pintu masuk.

h. Kendala/masalah yang dihadapi

- 1) Pelaksanaan kegiatan masih belum maksimal sehingga realisasi pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) yang telah disusun pada awal tahun, hal ini disebabkan jumlah alat angkut yang beroperasi ke wilayah kerja kurang sehingga menyebabkan keterlambatan pengiriman laporan dari wilker ke induk.
- 2) Masih terbatasnya SDM terutama tenaga sanitarian dan entomologi khususnya di wilayah kerja.
- 3) Adanya konflik masyarakat di wilayah kerja, yang menyebabkan petugas tidak dapat melaksanakan kegiatan di wilayah kerja karena terkait keamanan.
- 4) Sulitnya mencapai hasil HI,CI, dan BI daerah buffer untuk mencapai <1% sesuai dengan PK, hal ini dikarenakan sumber air bersih mengandalkan air hujan dan air tangki mobil sehingga untuk melakukan pengurasan container masyarakat merasa keberatan dan apabila akan dilakukan larvasida juga sebagian besar keberatan karena air tersebut di gunakan untuk di konsumsi.
- 5) Untuk melaksanakan pemeriksaan kualitas kimia dan bakteriologis air bersih di wilayah kerja setiap 2 bulan tidak dapat tercapai hal ini disebabkan karena dikabupaten Merauke tidak tersedia Lab Lingkungan.

i. Pemecahan Masalah

- 1) Melakukan evaluasi kegiatan dan segera menindak lanjuti permasalahan yang ada melalui rapat via Zoom
- 2) Melatih dan Memberdayakan masyarakat di wilayah kerja kantor kesehatan Pelabuhan Merauke sebagai kader untuk melaksanakan kegiatan survei larva *Aedes aegypti*, survei kepadatan lalat dan survei vektor pes
- 1) Menunggu penyelesaian konflik di wilayah kerja.

- 2) Menyarankan masyarakat untuk selalu menutup tempat penampungan air.
- 3) Menyesuaikan jumlah pemeriksaan kualitas air bersih dengan anggaran yang tersedia pada DIPA 2023, dan konsolidasi kegiatan yang memiliki anggaran untuk dapat melaksanakan pemeriksaan kualitas kimia dan bakteriologis air bersih di kota yang memiliki Laboratorium lingkungan.

J. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Anggaran yang digunakan untuk indikator indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara dapat dilihat pada tabel :

Tabel 23

Realisasi anggaran indikator indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara

No	Uraian Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
1	Penyelidikan Epidemiologi (PE) pada Situasi Khusus KLB/Wabah/KKM	Rp 35,560,000	Rp 30,347,200	Rp 5,212,800
Total		Rp 35,560,000	Rp 30,347,200	Rp 5,212,800

$$CKi = 85\% (0.85)$$

$$\text{Efisiensi} = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = \frac{1((35.560.000 \times 0.85) - 30.347.200)}{1(35.560.000 \times 0.85)} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = 17,18\% (0,12)$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{17,18\%}{20} \times 50\right)$$

$$NE = 50\% + (17,18\% \times 2,5)$$

$$NE = 50\% + 42,95\%$$

$$NE = 92,95\%$$

Dari hasil perhitungan realisasi anggaran indikator persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan diperoleh hasil ,0,12 artinya tidak efisien karena realisasi anggaran lebih besar dari pada capaian kinerja menunjukkan hasil efisien

2) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada indikator ini sangat didukung oleh

adanya kader pada kegiatan pengamatan dan pengendalian vektor dan binatang penular penyakit. Adanya kader terlatih ini sangat berperan dalam pelaksanaan survei dan pengendalian vektor dan BPP karena keterbatasan jumlah petugas KKP terutama di wilayah kerja.

4. Indikator Nilai kinerja anggaran

a. Pengertian

Indikator nilai kinerja anggaran merupakan performance budgeting penilaian dan pengukuran suatu biaya anggaran yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk atau layanan. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran oleh satuan kerja difasilitasi dengan Aplikasi SMART DJA. Variabel yang diukur antara lain capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi, dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

b. Deflnisi Operasional

Besarnya nilai kinerja penganggaran yang diperoleh melalui perhitungan kinerja menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan yang diformulasikan dari

- a. Aspek Implementasi yang memperhitungkan realisasi anggaran, konsistensi antara RPD dan RPK, efisiensi dan capaian keluaran yang ditargetkan di dalam RKA-K/L secara tahunan.
- b. Aspek Manfaat yang memperhitungkan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Indikator Sasaran Program/Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Sasaran Strategis (ISS) yang ditarget di dalam RENJA K/L dan RENSTRA K/L secara tahunan.
- c. Aspek Konteks yang memperhitungkan relevansi, kejelasan, keterukuran informasi kinerja dengan dinamika masalah yang coba dipecahkan melalui intervensi program.

c. Rumus Cara Perhitungan

Nilai agregat dari nilai aspek implementasi (terdiri nilai realisasi, konsistensi, efisiensi, pencapaian keluaran dan kesesuaian RPK- RPD), aspek manfaat dan aspek konteks menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan

d. Capaian indikator

Nilai kinerja anggaran sebagaimana tertuang dalam kinerja SMART pada aplikasi Monev DJA terdiri dari beberapa komponen penilaian, yang meliputi :

- 1) Realisasi anggaran
- 2) Konsistensi Rencana Penarikan Dana (RPD)

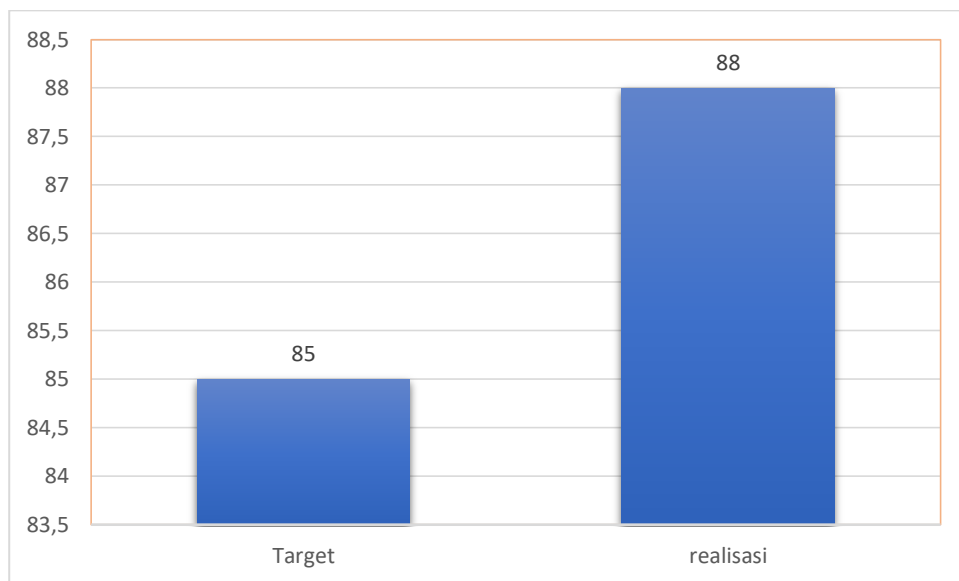
3) Realisasi Output

4) Efisiensi

Adapun penjelasan dan cara pengukuran pada masing-masing parameter berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Capaian kinerja indikator nilai kinerja anggaran pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke tahun 2022 dapat dilihat pada grafik :

Grafik 8
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022



Dari grafik dapat kita lihat bahwa capaian target Nilai Kinerja Anggaran KKP Kelas III Merauke tahun 2022 adalah 88 lebih tinggi dari target yang telah ditentukan dalam perjanjian kinerja yaitu 85 (104%). Berdasarkan hasil capaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indikator Nilai Kinerja Anggaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke pada tahun 2022 realisasi capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan dan memenuhi kriteria “Baik” yang merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 dimana nilai Kinerja Anggaran dalam kategori Baik berada pada rentang 80 sampai dengan 90. Rincian Nilai Kinerja Anggaran yang diperoleh dari aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu)

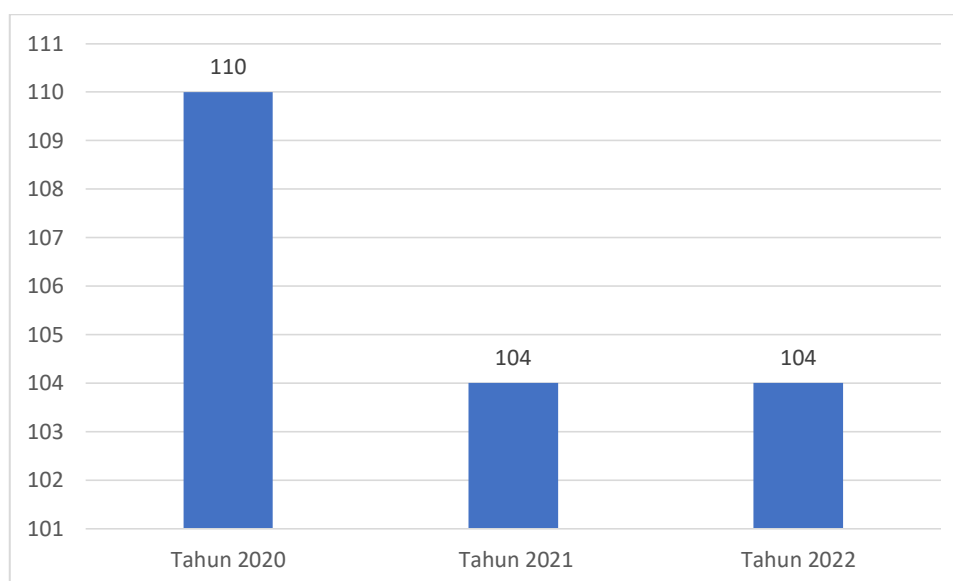
e. Perbandingan capaian target

1) Capaian indikator kinerja anggaran dibandingkan tahun sebelumnya

Tabel 24
capaian indikator kinerja anggaran dibandingkan tahun sebelumnya

Indikator	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
	Target	Capaian	Persentase	Target	Capaian	Persentase	Target	Capaian	Persentase
Nilai Kinerja Anggaran	80	88	110	83	86	104	85	88	104

Grafik 9
Perbandingan Persentase Capaian Target Nilai Kinerja Anggaran



Persentase kinerja RKA-K/L yang efektif dan efisien adalah hasil penilaian nilai kinerja anggaran dengan menggunakan tools aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga menyebutkan bahwa kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Untuk memperoleh hasil kinerja anggaran dilakukan Evaluasi Kinerja Anggaran yakni suatu proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas kinerja anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran. Dari tabel dan grafik dapat dilihat bahwa persentase capaian nilai kinerja anggaran tahun 2022 sebesar 104% sama besar dibandingkan capaian nilai kinerja anggaran tahun

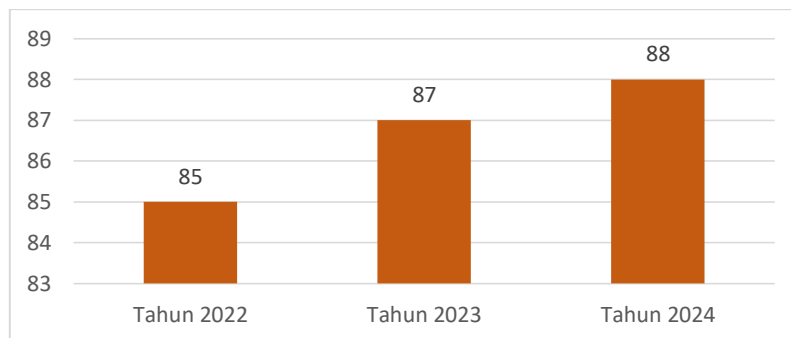
2021 sebesar 104% dan lebih kecil dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 110%, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat penurunan persentase capaian target dari tahun 2021 dan 2022 akan tetapi masih diatas target yang telah ditentukan didalam perjanjian kinerja setiap tahun.

2) Capaian indikator nilai kinerja anggaran dibandingkan dengan Renstra (RAK 2020 - 2024)

Tabel 25
Capaian indikator nilai kinerja anggaran dibandingkan dengan target tahun 2023, dan 2024

Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023	Tahun 2024
	Target	capaian	persentase		
Nlai Kinerja Anggaran	85	88	104%	87	88

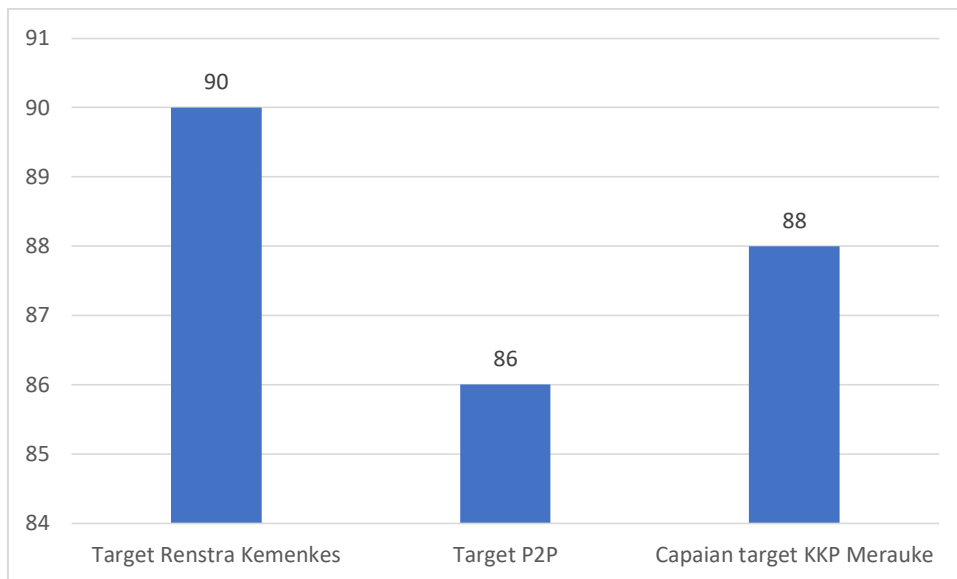
Grafik 10
Perbandingan target tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024



Dari tabel dan grafik dapat dilihat bahwa target nilai kinerja anggaran tahun 2022 sebesar 85, capaian sebesar 88 (104%), untuk tahun 2023 target ditingkatkan menjadi 87 dan tahun 2024 target ditingkatkan menjadi 88

3) Perbandingan capaian target dengan standar nasional

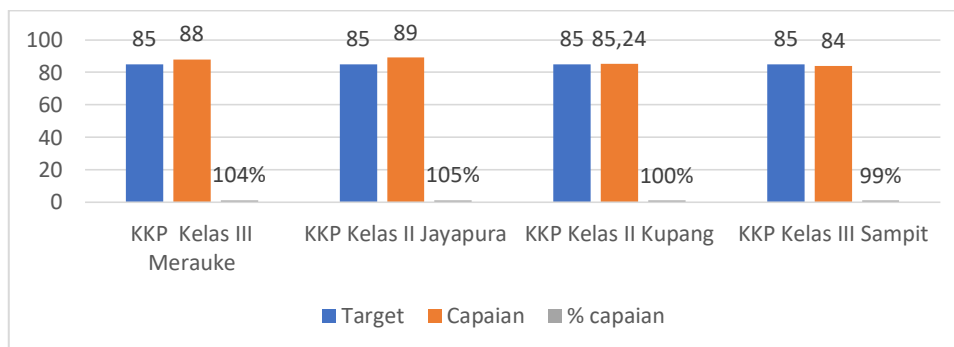
Grafik 11
Perbandingan capaian target dengan standar nasional



Dari grafik dapat dilihat bahwa capaian target nilai kinerja anggaran KKP Kelas III Merauke diatas target P2P (86) dan berada dibawah target Renstra Kemenkes 2020-2024 (95). Realisasi capaian KKP Kelas III Merauke belum tercapai bila dibandingkan dengan renstra, hal ini disebabkan karena Pembayaran belanja pegawai ditahun 2022 tidak terserap.

4) Perbandingan capaian target dibandingkan dengan KKP KKP Kelas II Kupang, KKP Kelas II Mataram dan KKP Kelas III Sampit

Grafik 12
Capaian indikator nilai kinerja anggaran dibandingkan dengan KKP Kelas II Kupang, KKP Kelas II Jayapura dan KKP Kelas III Sampit



Dari grafik dapat dilihat bahwa Persentase capaian nilai kinerja anggaran KKP Kelas III Merauke sebesar 104% lebih rendah dari KKP Kelas II Jayapura dan lebih tinggi persentase capaian targetnya dibanding persentase capaian nilai kinerja anggaran KKP Kelas II Kupang (100%) dan KKP Kelas III Sempit (99%), hal ini menunjukkan bahwa KKP Kelas III Merauke mampu melaksanakan pengelolaan anggaran melebihi target yang telah ditetapkan

a) Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator

- 1) Melakukan Rekonsiliasi data, melakukan monitoring, evaluasi dan melakukan pengisian emonev DJA. Pemantauan atas rencana pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran setiap bulan, sehingga meminimalisir adanya gap antara rencana penarikan dana/ rencana pelaksanaan kegiatan Koordinasi antar Substansi yang ada di KKP Kelas III Merauke dengan penanggungjawab keuangan dalam proses pencairan anggaran berjalan dengan baik sehingga meminimalisir hambatan dalam pelaksanaan
- 2) Perlunya komitmen dalam melaksanakan kegiatan setiap bulan (sesuai dengan Rencana Penarikan Dana dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan)
- 3) Meningkatkan *awareness* dalam melaksanakan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan setiap bulan
- 4) Konsolidasi langkah penyelesaian masalah dan melakukan evaluasi rutin

b) Analisa penyebab keberhasilan

Analisa penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja anggaran di KKP Merauke didukung oleh :

- 1) Penyusunan RPD dan RPK di awal tahun kegiatan
- 2) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan jadwal yang ditentukan
- 3) Evaluasi penyerapan anggaran yang dilaksanakan setiap bulan
- 4) Implementasi penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan output.
- 5) Pelaksanaan evaluasi bulanan, triwulan dan semester terkait realisasi fisik dan anggaran

c) Kendala/masalah

Yang menjadi permasalahan pada indikator Nilai Kinerja Anggaran adalah :

- 1) Terdapat indikator yang dapat dihitung dalam periode satu tahun dengan target satu layanan, sehingga capaian indikator tidak dapat menggambarkan secara bulanan

- 2) Realisasi anggaran tidak sesuai dengan rencana penarikan dana.
- 3) Kegiatan yang bersumber dari PNBPN telah dilakukan akan tetapi pencairan anggarannya menunggu sampai dana PNBPN terkumpul.
- 4) Laporan capaian output bidang/bagian tidak selalu tepat waktu disampaikan
- 5) Proses revisi yang dilakukan 5 kali dan hal ini memerlukan waktu yang berakibat pada tidak konsistensinya Rencana Penarikan Dana

d) Pemecahan Masalah

- 1) Mengisi progress capaian keluaran setiap bulannya, sehingga walaupun volume layanan belum tercapai namun tetap ada keterangan progres kegiatan
- 2) Dilakukan rekon dalam rangka monitoring atas capaian kinerja, realisasi kegiatan dan rencana kegiatan bidang/bagian.
- 3) Kepala Kantor memberikan sanksi bagi sunstansi/subbagian dan wilayah kerja yang terlambat menyampaikan laporan setiap bulan
- 4) Melakukan perencanaan yang baik untuk tahun 2023 sehingga revisi anggaran tidak berulang kali dilakukan

f. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dapat diperoleh melalui rumus :

$$CKi = 104\% (1,04)$$

$$\text{Efisiensi} = \frac{\sum_{i=1}^n((927.506.000 \times 1,04) - 878.734.322)}{\sum_{i=1}^n(927.506.000 \times 1,04)} \times 100 \%$$

$$\text{Efisiensi} = 0.09 \% (0.0009)$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{0.09\%}{20} \times 50 \right)$$

$$NE = 50\% + (0.09\% \times 2,5)$$

$$NE = 50\% + 0,23\%$$

$$NE = 50,23\%$$

Berdasarkan perhitungan efisiensi indikator nilai kinerja anggaran diperoleh hasil 0,0009, artinya tidak efisien karena realisasi anggaran lebih besar dari capaian kinerja.

5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

a. Pengertian

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas

b. Defenisi Operasional

Ukuran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan,efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi

c. Rumus/Cara perhitungan

Nilai agregat dari revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM, capaian output

d. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

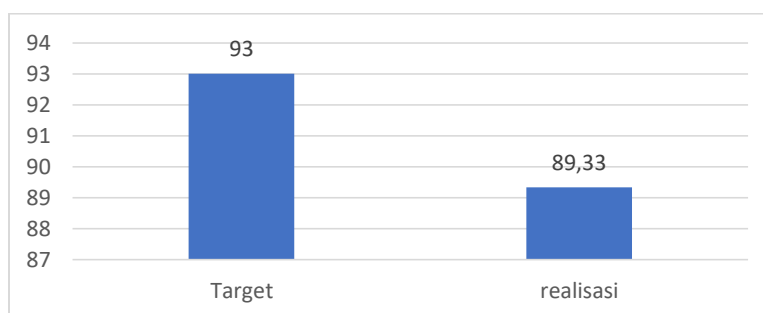
Tabel 26

Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator	2022		
	Target	Capaian	Persentase
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93	89.33	96.05

Grafik 13

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

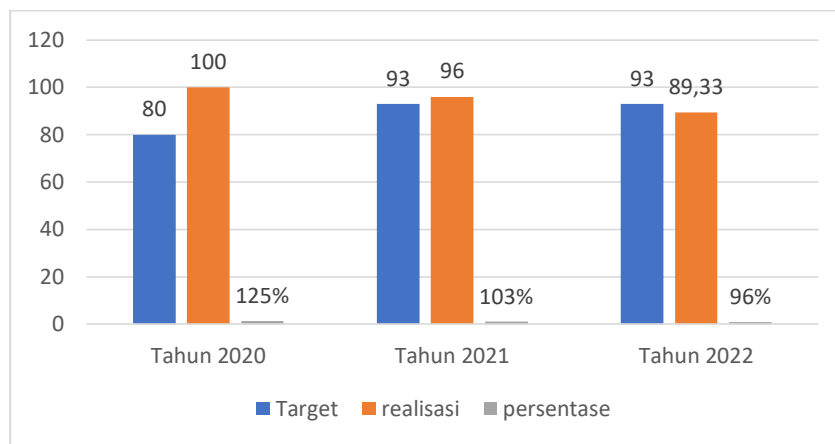


Capaian nilai IKPA tahun 2022 sebesar 89,33 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2022 sebesar 93 sehingga pencapaian kinerja sebesar 96,5 %. Berdasarkan nilai tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke pada tahun 2022 capaiannya melebihi target yang telah di tetapkan dan memenuhi kriteria “Baik”.

e. Perbandingan capaian target

1) Perbandingan capaian target dengan tahun sebelumnya

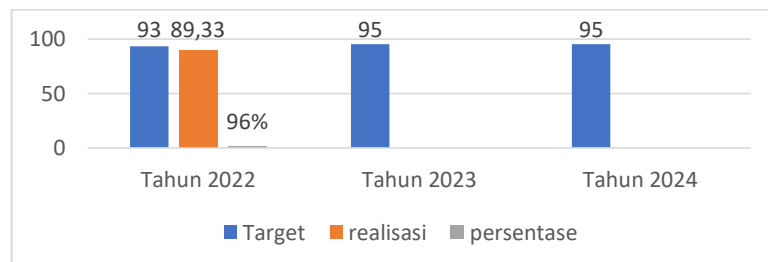
Grafik 14
Perbandingan capaian target 2022 dengan tahun sebelumnya



Dari grafik dapat dilihat bahwa target nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun 2022 sebesar 93, capaian sebesar 89,33 (96%). Capaian target tersebut lebih rendah dibandingkan capaian target tahun 2021 (103%) dan capaian target tahun 2020 (125%). Untuk target tahun 2020 dihitung berdasarkan persentase kepatuhan penyampaian laporan keuangan.

2) Perbandingan capaian target dengan target jangka menengah (RAK 2020-2024)

Grafik 15
Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

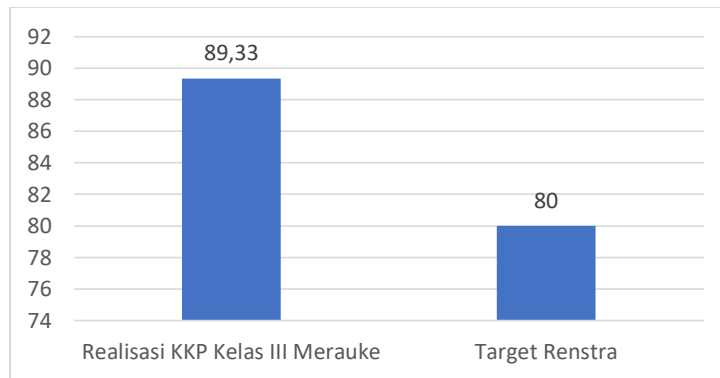


Dari grafik dapat dilihat bahwa target Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun 2020 93 (96%), target 2023 dan 2024 ditingkatkan menjadi 95, walaupun capaian target tahun 2022 belum tercapai dimana masih terdapat kekurangan dari target yang telah ditentukan, namun masih ada peluang untuk meningkatkan capaian kinerja ditahun mendatang sehingga target jangka menengah dapat tercapai. Diperlukan upaya peningkatan capaian melalui upaya realisasi anggaran sesuai proporsi penyerapan berdasarkan proporsi penyerapan secara triwulan sehingga penyerapan anggaran terutama belanja modal dan barang tidak diakhir tahun dan mengurangi deviasi relaisasi dengan yang direncanakan.

3) Perbandingan capaian target dengan standar Nasional

Grafik 16

Perbandingan capaian target dengan standar Nasional

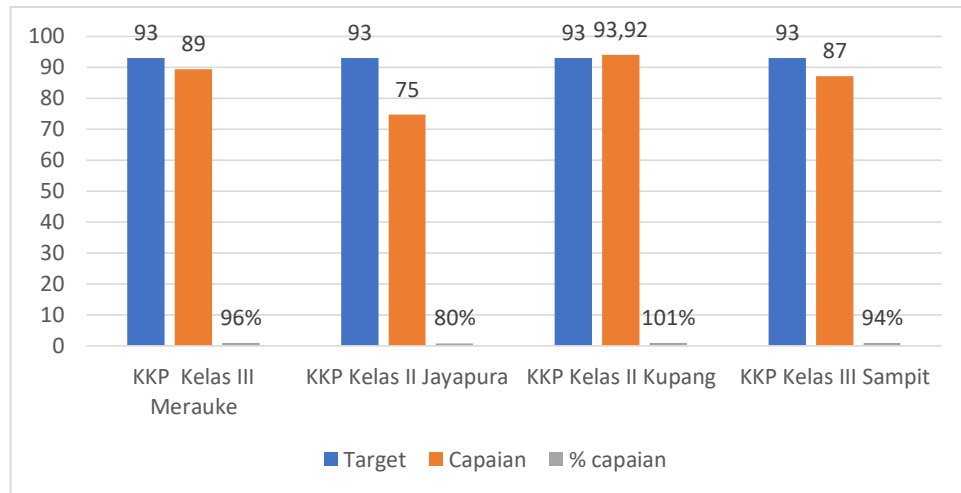


Dari grafik dapat dilihat bahwa capaian target KKP Kelas III Merauke pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun 2022 telah melebihi target pada Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2022 yaitu 80. Secara tidak langsung dapat disimpulkan, KKP Kelas III Merauke telah berkontribusi dalam pencapaian target Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran secara nasional.

4) Perbandingan capaian target dengan KKP lain yang sejenis

Grafik 17

Capaian nilai indikator kinerja dibandingkan dengan KKP Kelas II Kupang, KKP Kelas II Jayapura dan KKP Kelas III Sampit



Dari grafik dapat dilihat bahwa persentase capaian nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) KKP Kelas III Merauke sebesar 96% lebih rendah dari persentase capaian nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) KKP Kelas II Kupang (101%), dan lebih tinggi dari capaian target KKP Kelas II Jayapura (80%) dan KKP Kelas III Sampit (94%), Data tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran pada KKP Kelas III Merauke belum maksimal, salah satu penyebab adalah belanja .gaji yg tidak terserap senilai Rp. 776.474.107 dan belanja barang yang tidak terserap senilai Rp. 544.919.597.

f. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator

- 1) Mengurangi pelaksanaan Revisi DIPA
- 2) Tidak terdapat pagu minus pada transaksi keuangan
- 3) Kepatuhan dalam penyampaian laporan keuangan
- 4) Tidak ada perbedaan rekonsiliasi internal Modul Persediaan, Modul Aset dengan Modul GLP

g. Analisa penyebab kegagalan

- 1) Jaringan internet yang kurang mendukung sehingga dapat mengakibatkan keterlambatan input pada aplikasi pengelolaan keuangan
- 2) Rekon eksternal antara Modul Persediaan dan Modul GLP terdapat persediaan yang belum diregister
- 3) Keterlambatan pengiriman ADK dropping Pusat ke Satker sehingga mengakibatkan rekon eksternal antara Modul Persediaan, Modul Aset dan Modul GLP melakukan rekon ulang internal

h. Pemecahan Masalah

- 1) Melakukan revisi anggaran dan dialihkan pada kegiatan yang dapat menunjang program kegiatan
- 2) Upaya percepatan penyerapan anggaran
- 3) Mengikuti sosialisasi /webinar tentang upaya/ langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran

i. Efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 27

Realisasi Anggaran Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

No	Uraian Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
1	Dukungan Pelaksanaan Pengelolaan BMN	35,140,000	33,497,453	1,642,547
2	Pameran Bidang Kesehatan pada kegiatan LP/LS (HKN dan Perayaan Pameran Daerah)	4,500,000	4,500,000	-
3	Penyusunan dan Reviu Analisis Beban Kerja, Peta dan Informasi Jabatan	3,000,000	2,990,000	10,000
4	Reviu Data Klasifikasi UPT	500,000	500,000	-
5	Pengelolaan dan Pendukung Penilaian Pelayanan Kantor Berhias	35,123,000	34,722,733	400,267
6	Pengelolaan Arsip dan Pendukung Perlengkapan Kearsipan	33,300,000	33,260,100	39,900
7	Pembayaran gaji dan tunjangan	4,798,434,000	4,021,959,893	776,474,107
8	Pemeliharaan Sarana Gedung dan Bangunan	553,345,000	498,613,324	54,731,676
9	pengadaan Pakaian Dinas	105,400,000	104,980,250	419,750
10	Langganan Daya dan Jasa	327,480,000	194,434,055	133,045,945
11	Honor Tenaga Pramubakti, Kebersihan, Satpam dan Supir	1,110,850,000	1,083,900,000	26,950,000
12	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	110,832,000	110,832,000	-
13	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	8,160,000	8,160,000	-
14	Honorarium Pengelola PNPB	23,040,000	23,040,000	-
15	Honorarium Pengelola SAI/BMN	12,600,000	12,600,000	-
16	Honorarium Pengurus/Penyimpan BMN	7,200,000	7,200,000	-
17	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2, Roda 4 dan Kendaraan Khusus (Ambulance)	504,823,000	429,678,051	75,144,949
18	Perlengkapan Perkantoran Sehari-Hari	103,600,000	103,585,459	14,541
19	Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Kantor	155,016,000	61,862,030	93,153,970
20	Pemeriksaan Kesehatan Pegawai	95,760,000	82,900,000	12,860,000
21	Sewa Gedung Kantor	182,000,000	158,800,000	23,200,000
22	Pengadaan Meubelair Kantor Wilayah Kerja Bade	129,019,000	127,276,650	1,742,350
23	Pengadaan Sarana Komputer dan Meubelair Kantor	176,300,000	174,471,581	1,828,419
24	Penyusunan/Revisi RAK	1,300,000	1,300,000	-
25	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program	6,760,000	3,982,000	2,778,000
26	Evaluasi/Penyusunan Laporan Tahunan	2,500,000	2,500,000	-
27	Penyusunan Laporan Indikator RAK, LAKIP, Perjanjian Kinerja	4,600,000	4,600,000	-
28	Evaluasi SAKIP	14,550,000	14,362,143	187,857
29	Rekonsiliasi Pengelolaan PNPB	58,907,000	58,267,600	639,400
Jumlah		8,604,039,000	7,398,775,322	1,205,263,678

$$CKi = 103\% (1,03)$$

$$\text{Efisiensi} = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100 \%$$

$$\text{Efisiensi} = \frac{1((8.604.039.000 \times 1,03) - 7.398.775.322)}{8.604.039.000 \times 1,03} \times 100 \%$$

$$\text{Efisiensi} = 0.17\% (0.0002)$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{0.17\%}{20} \times 50 \right)$$

$$NE = 50\% + (0.17\% \times 2,5)$$

$$NE = 50\% + 0,43\%$$

$$NE = 50,43\%$$

Berdasarkan perhitungan efisiensi indikator nilai kinerja anggaran diperoleh hasil 0,0002, artinya tidak efisien karena realisasi anggaran lebih besar dari capaian kinerja.

6. Kinerja implementasi WBK satker

a. Pengertian

Zona Integritas menuju WBK/WBBM merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang mempunyai komitmen mewujudkan wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM merupakan tindak lanjut dari penancangan pembangunan ZI. Terdapat 2 komponen penilaian, yaitu komponen pengungkit yang terdiri dari aspek pemenuhan (6 indikator) dan aspek reform (6 indikator) serta komponen hasil yang berasal dari survei persepsi korupsi (survei eksternal), capaian kinerja dan survei persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal)

b. Definisi operasional

implementasi WBK Satker dihitung dari akumulasi Nilai Total Pengungkit dan Nilai Total Hasil.

c. Rumus/Cara perhitungan

Perolehan nilai implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Satuan Kerja melalui penilaian mandiri (self Assesment) yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi yang berlaku dan kemudian dilakukan evaluasi oleh Unit Pembina Sekretariat Direktorat Jenderal P2P.

d. Capaian Indikator

Nilai hasil evaluasi oleh Unit Pembina Sekretariat Direktorat Jenderal P2P yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2022 diperoleh nilai Oplementasi WBK 72,31 dengan rincian penilaian :

A. Komponen pengungkit : 40,60

- Manajemen perubahan : 3,13
- Penataan tata laksana : 2,47
- Penataan Sistem Manajemen SDM : 2,81
- Penguatan akuntabilitas : 3,89
- Penguatan pengawasan : 6,06
- Peningkatan kualitas pelayanan publik : 3,39

B. Komponen hasil : 31, 71

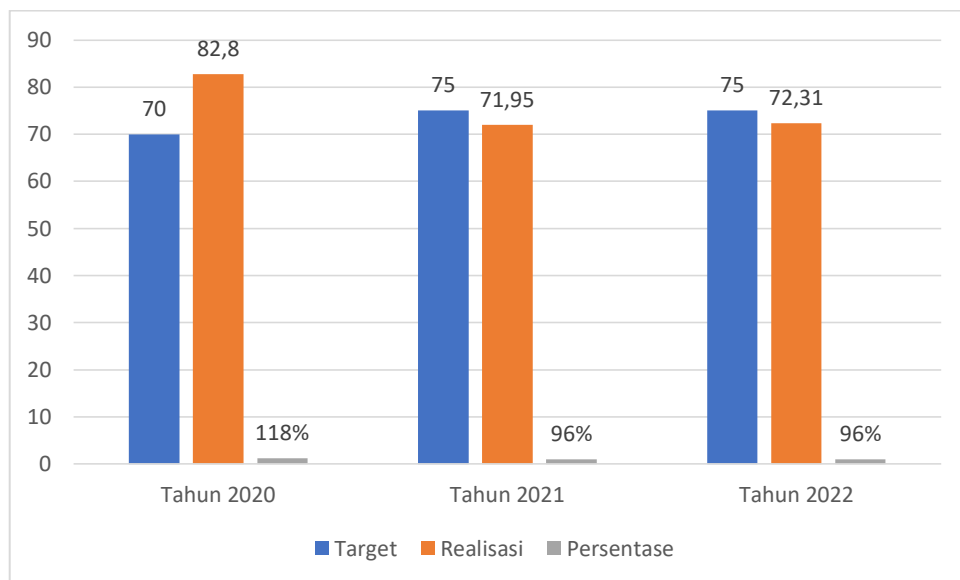
- Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel: 16,24
- Pelayanan Publik Yang Prima: 15,47

e. Perbandingan capaian target indikator

1) Perbandingan capaian target dengan tahun sebelumnya

Grafik 18

Perbandingan capaian target dengan tahun sebelumnya



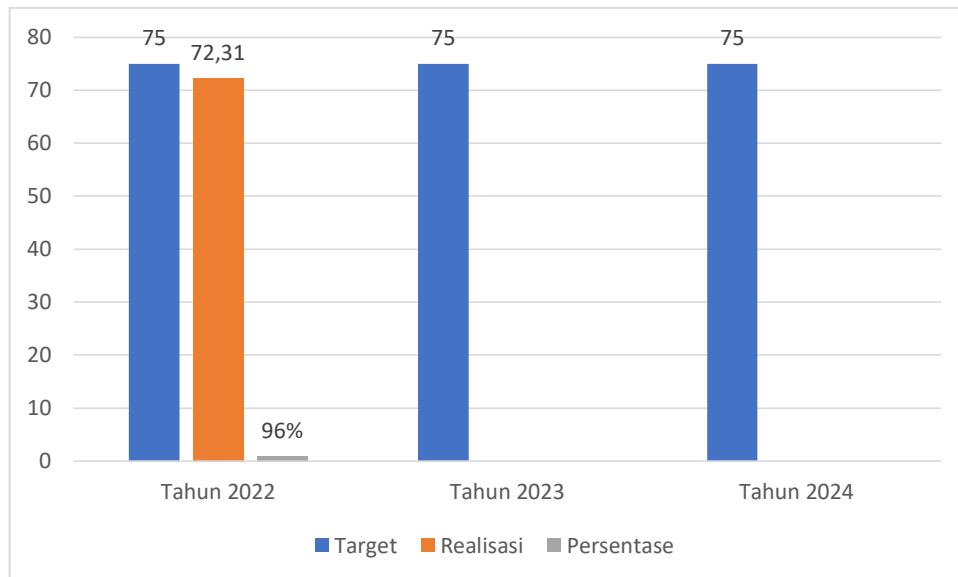
Dari grafik dapat dilihat bahwa tidak terjadi peningkatan capaian target kinerja implementasi WBK bahkan nilai WBK tahun 2022 (72,31) dan 2021 (71,95) lebih rendah dari tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen KKP Merauke dalam mewujudkan implementasi WBK Satker belum maksimal dan diharapkan tahun 2023 KKP Kelas

III Merauke dapat meningkatkan komitmen implementasi WBK sehingga dapat diusulkan oleh eselon 1 sebagai satker yang dapat dinilai oleh APIP Kemenkes menjadi Satker WBK.

- 2) Perbandingan capaian target dengan jangka menengah (RAK 2020-2024)

Grafik 19

Perbandingan capaian target dengan tahun 2023 dan tahun 2024



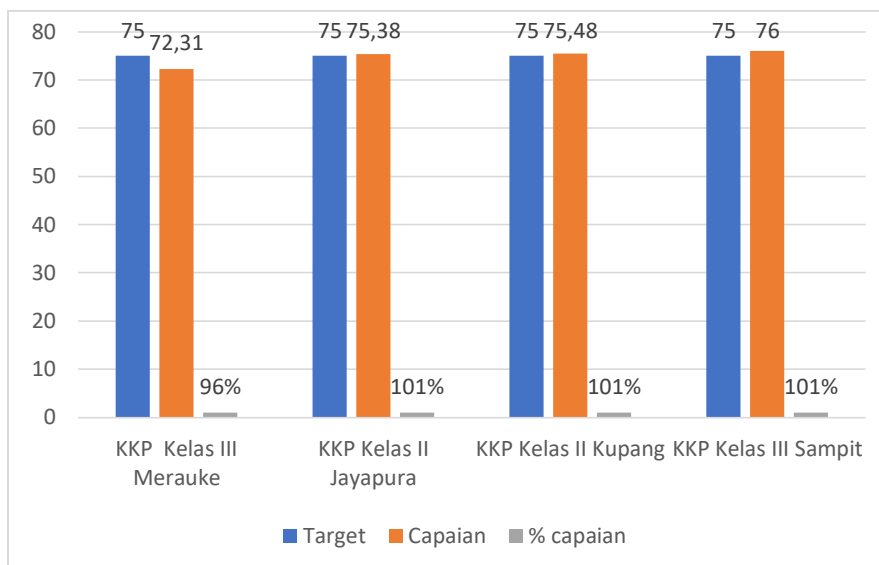
Dari grafik dapat dilihat bahwa target tahun 2022 – 2024 tidak mengalami perubahan (75) karena perhitungan target tersebut masih mengacu pada capaian tahun 2022, akan tetapi walaupun target tidak mengalami perubahan KKP Kelas III Merauke berupaya untuk dapat mencapai target yang telah ditentukan bahkan target KKP Kelas III Merauke tahun 2023 adalah dapat diusul oleh eselon 1 untuk dinilai oleh APIP menjadi salah satu satker dengan predikat WBK

- 3) Perbandingan capain target dengan standar nasional

Dalam Rencana Strategis Kemenkes dan RAP Ditjen P2P Tahun 2020- 2024 tidak terdapat indikator nilai kinerja implementasi WBK Satker, namun indikator ini mendukung pencapaian target indikator nilai reformasi birokrasi Ditjen P2P tahun 2022 yaitu 59

4) Perbandingan capaian target dengan KKP lain yang sejenis

Grafik 20
Capaian indikator penilaian kinerja implemenentasi WBK dibandingkan dengan KKP Kelas II Kupang, KKP Kelas III Jayapura dan KKP Kelas III Sampit



Dari grafik dapat dilihat bahwa capaian target penilaian WBK KKP Kelas III Merauke(72,31) paling rendah dibanding KKP Kelas II Jayapura (75,38), KKP Kelas II Kupang (75,48) dan KKP Kelas II Sampit (76). Data tersebut menunjukkan bahwa KKP Kelas III Merauke belum maksimal dengan komitmen melaksanakan implementasi WBK. Hal tersebut menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan implementasi WBK tahun 2023.

f. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator

- 1) Menyusun rencana kerja pembangunan zona integritas
- 2) Melakukan evaluasi kegiatan setiap pokja WBK secara rutin setiap bulan dan membahas tentang permasalahan rencana kerja yang belum dilaksanakan
- 3) Melakukan tindak lanjut dari hasil assessment eselon 1
- 4) Melakukan advokasi dan Sosialisasi kepada pegawai terutama yang berada di wilayah kerja tentang implementasi WBK
- 5) Mengalokasikan anggaran yang dapat mendukung pelaksanaan implementasi WBK Satker

g. Analisa Penyebab Kegagalan

Kegagalan dalam Implementasi WBK pada satker disebabkan oleh :

- 1) Evaluasi kegiatan setiap pokja dan Tim WBK tidak rutin dilaksanakan
- 2) Upaya tindak lanjut dari hasil assessment Itjen tahun 2021 belum sepenuhnya dilaksanakan

- 3) Advokasi dan Sosialisasi kepada pegawai terutama yang berada di wilayah kerja tentang implementasi WBK belum dilaksanakan

h. Kendala/masalah yang dihadapi

- 1) Belum semua pegawai terpapar tentang informasi Pembangunan Zona Integrasi Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
- 2) Belum optimalnya komitmen bersama dalam menegakkan upaya Pembangunan Zona Integrasi Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

i. Pemecahan Masalah

- 1) Meningkatkan koordinasi antara tim Pokja WBK
- 2) Melakukan advokasi dan sosialisasi kepada semua pegawai tentang implementasi WBK

j. Efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 28

Realisasi anggaran indikator kinerja implementasi WBK Satker

No	Uraian Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
1	Layanan Hukum	Rp 14,310,000	Rp 14,310,000	Rp -
2	Layanan Hubungan Masyarakat	Rp 29,500,000	Rp 29,434,500	Rp 65,500
3	Pembangunan Zona Integritas Menuju Satker WBK dan Atau Penguatan dan Pendampingan Assesment Satker WBK/WBBM	Rp 32,053,000	Rp 29,965,820	Rp 2,087,180
Total		Rp 75,863,000	Rp 73,710,320	Rp 2,152,680

$$CKi = 97\% (0,97)$$

$$Efisiensi = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100 \%$$

$$Efisiensi = \frac{((75.863.000 \times 0,97) - 73.310.320)}{75.863.000 \times 0,97} \times 100 \%$$

$$Efisiensi = 2,92 \% (0,2)$$

$$NE = 50\% + \frac{E}{20} \times 50$$

$$NE = 50\% (2,92\% \times 2,5)$$

$$NE = 57\%$$

Berdasarkan Perhitungan Efisiensi indikator di peroleh hasil 0,3 artinya Tidak Efisien karena Realisasi Anggaran lebih besar daripada Capaian Kinerja

7. Persentase peningkatan kapasitas SDM sebanyak 20 JPL dalam satu tahun

a) Pengertian

Suatu proses yang didesain untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis, ataupun meningkatkan kinerja pegawai, khususnya di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir

b) Defenisi Operasional

ASN yang ditingkatkan kompetensinya paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional. Pengembangan kompetensi pegawai dapat diperoleh dari pendidikan, pelatihan klasikal yaitu tatap muka di kelas, dan pelatihan non klasikal yaitu praktik kerja/pembelajaran luar kelas

c) Rumus/Cara perhitungan

Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas sebanyak 20 JPL dibagi seluruh jumlah seluruh ASN dikali 100 %

Jumlah ASN yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 20 JPL =

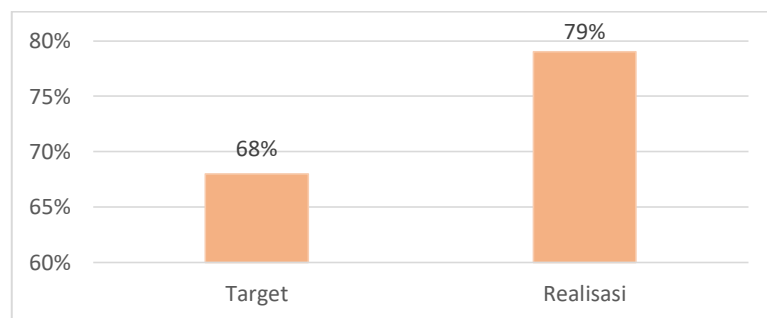
$$\frac{27}{34} \times 100 \%$$

Jumlah ASN yang ditingkatkan Perbandingan capaian target dengan sebanyak 20 JPL = 116%

d) Capaian Indikator

Grafik 21

Perbandingan persentase target ASN yang ditingkatkan kompetensinya



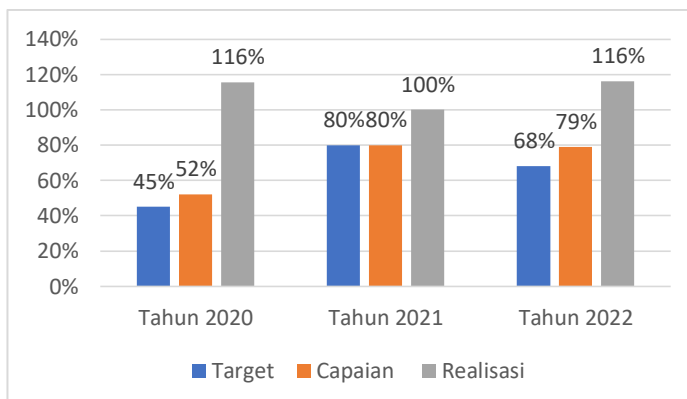
Dari grafik dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 persentase ASN KKP Kelas III Merauke yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 20 JPL adalah 79% (27 orang) dari target yang telah ditentukan dalam perjanjian kinerja tahun 2022 sebesar 68% (23 orang). ASN yang tidak mencapai target peningkatan kompetensinya (20 JPL) adalah ASN yang bertugas di wilayah kerja, hal ini disebabkan karena terkendala jaringan yang tidak stabil sehingga ASN yang berada di wilayah kerja tidak dapat mengikuti peningkatan SDM yang dilakukan secara daring.

e) Perbandingan capaian target indikator

1) Perbandingan capaian target dengan tahun sebelumnya

Grafik 22

Perbandingan capaian target dengan tahun sebelumnya

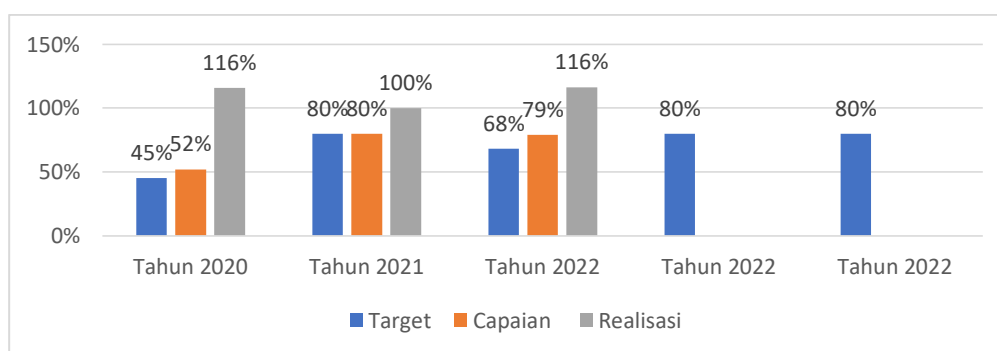


Berdasarkan persentase capaian target ASN yang ditingkatkan kompetensinya, tahun 2022 mengalami peningkatan persentase capaian target dibandingkan tahun 2021. Hal ini disebabkan karena pada bulan Juli tahun 2022, target Perjanjian Kinerja tahun 2022 diturunkan dari 80% menjadi 68% dengan justifikasi bahwa pada bulan Maret-Mei Kabupaten Merauke dan kabupaten lainnya yang menjadi wilayah kerja KKP Merauke mengalami gangguan signal (putus jaringan internet di bawah laut). Kondisi tersebut mengakibatkan ASN tidak dapat mengikuti peningkatan kompetensi secara daring.

2) Perbandingan capaian target dengan jangka menengah (RAK 2020-2024)

Grafik 23

Perbandingan capaian target dengan target jangka menengah

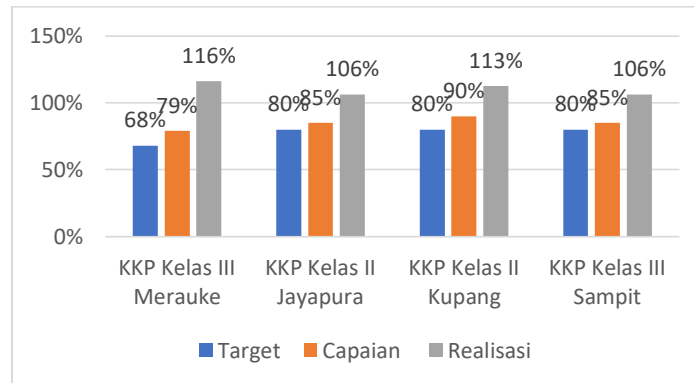


Target peningkatan kompetensi ASN tahun 2023 dan tahun 2024 ditingkatkan menjadi 80% dengan tujuan agar target 27 orang dari 34 orang ASN KKP Kelas III Merauke dapat meningkatkan kapasitas/kemampuannya dengan berupaya mengikuti kegiatan yang dapat menghasilkan output peningkatan ASN sebanyak 20 JPL dalam satu tahun

3) Perbandingan capaian target dengan KKP lain yang sejenis

Grafik 24

Perbandingan capaian target dengan KKP lain yang sejenis



Persentase capaian target peningkatan kapasitas SDM sebanyak 20 JPL tahun 2022 KKP Kelas III Merauke 116 % KKP Kelas II Kupang sebesar 113%, KKP Kelas II Jayapura 106% dan KKP Kelas III Sampit 106%. Keempat KKP telah memenuhi target peningkatan kompetensi SDM (20 JPL) melebihi target yang ditentukan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022

f) Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator

- 1) Merencanakan dan menganggarkan peningkatan SDM setiap tahun
- 2) Melakukan bimbingan teknis di wilayah kerja
- 3) Meningkatkan kemampuan pegawai untuk belajar mandiri

g) Analisa Penyebab Keberhasilan

Penyebab keberhasilan dari indikator peningkatan kapasitas SDM adalah :

- 1) Tersedianya anggaran untuk upaya peningkatan SDM
- 2) Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang pegawai untuk meningkatkan SDM

h) Kendala/masalah yang dihadapi

1. Perencanaan anggaran yang direncanakan untuk upaya peningkatan SDM tidak terpenuhi
2. Upaya peningkatan SDM dalam bentuk e-learning terkadang terhambat oleh jaringan internet yang tidak memadai terutama bagi pegawai yang bertugas di wilayah kerja

i) Pemecahan Masalah

- 1) Pejabat struktural rutin melaksanakan evaluasi dan bimbingan teknis di wilayah kerja

- 2) Pejabat struktural dapat menjadi coaching di kantor dengan tujuan meningkatkan wawasan dan kapasitas SDM
- 3) Membuat perencanaan peningkatan ASN setiap tahun

h) Efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 29

Realisasi anggaran indikator persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL

No	Uraian Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
1	Peningkatan Kompetensi Mendukung Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Epidemiolog, Entomolog, Sanitarian, Dokter, Perawat, Arsiparis, dll)	Rp 148,600,000	Rp 148,600,000	Rp -
2	Peningkatan Kompetensi	Rp 28,200,000	Rp 25,214,707	Rp 2,985,293
3	Bimtek/Monev Program Dukungan Manajemen ke Wilayah Kerja	Rp 294,544,000	Rp 291,905,264	Rp 2,638,736
4	Penyusunan dan Reviu Analisis Beban Kerja, Peta dan Informasi Jabatan	Rp 3,000,000	Rp 2,990,000	Rp 10,000
5	Peningkatan Kompetensi Pegawai	Rp 67,710,000	Rp 61,747,780	Rp 5,962,220
Total		Rp 542,054,000	Rp 530,457,751	Rp 11,596,249

$$CKi = 98\% (0.98)$$

$$\text{Efisiensi} = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100 \%$$

$$\text{Efisiensi} = \frac{((542.054.000 \times 1) - 530.547.751)}{542.054.000 \times 0.98} \times 100 \%$$

$$\text{Efisiensi} = 2,19 \% (0,3)$$

$$NE = 50\% + \frac{E}{20} \times 50$$

$$NE = 50\% (2,19\% \times 2,5)$$

$$NE = 55\%$$

Berdasarkan Perhitungan Efisiensi indikator di peroleh hasil 0,3 artinya Tidak Efisien karena Realisasi Anggaran lebih besar daripada Capaian Kinerja

B. SUMBER DAYA ANGGARAN

Sumber Daya Anggaran Berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-024.05.2.416057/2022, anggaran KKP Kelas III Merauke sebesar 13.319.590.000 yang terdiri dari :

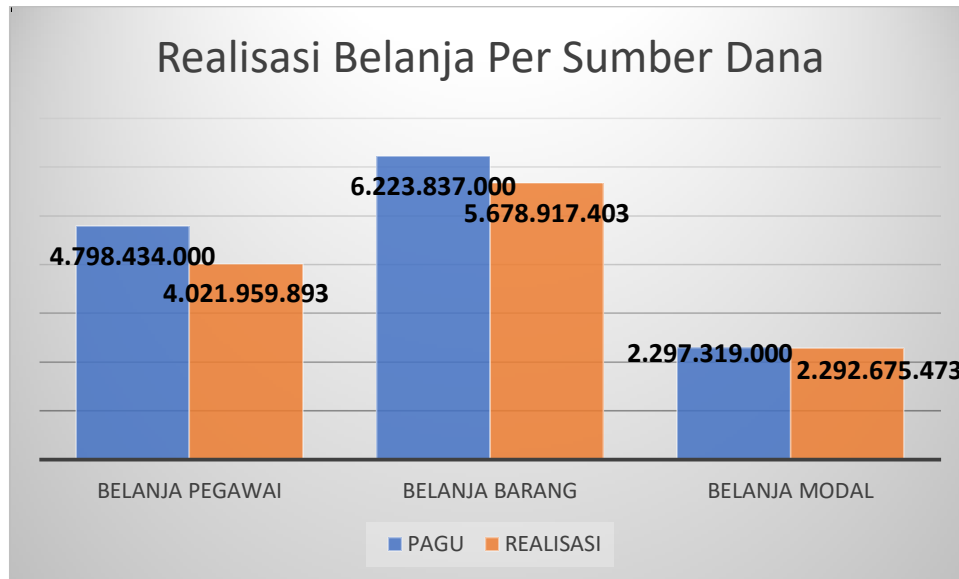
1. Realisasi Belanja Per Sumber Dana

Realisasi Belanja per sumber dana dapat dilihat pada tabel:

Tabel 30 Realisasi Belanja Per Sumber Dana

NO	URAIAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
1	Belanja Pegawai	4,798,434,000	4,021,959,893	83.82%
2	Belanja Barang	6,223,837,000	5,678,917,403	91.24%

3	Belanja Modal	2,297,319,000	2,292,675,473	99.8%
	Persentase Keseluruhan	13,319,590,000	11,993,552,769	90.04 %



Grafik 25 Realisasi Belanja Per Sumber Dana

2. Persentase Serapan Anggaran Perbulan

Persentase serapan anggaran perbulan dapat dilihat pada tabel :

Tabel 31 Persentase Serapan Anggaran Perbulan

NO	BULAN	PAGU	REALISASI PERBULAN	JUMLAH REALISASI	PERSENTASE
1	Januari	13.319.590.000	388.311.647	388.311.647	2,92%
2	Februari	13.319.590.000	678.474.495	1.066.786.142	8,01%
3	Maret	13.319.590.000	706.775.484	1.773.561.626	13,32%
4	April	13.319.590.000	1.077.451.799	2.851.013.425	21,40%
5	Mei	13.319.590.000	662.620.586	3.513.634.011	26,38%
6	Juni	13.319.590.000	734.077.642	4.247.711.653	31,89%
7	Juli	13.319.590.000	2.554.086.001	6.801.797.654	51,07%
8	Agustus	13.319.590.000	857.175.360	7.658.973.014	57,50%
9	September	13.319.590.000	765.546.431	8.424.519.445	63,25%
10	Oktober	13.319.590.000	1.372.233.747	9.796.753.192	73,55%
11	November	13.319.590.000	399.339.961	10.196.093.153	76,55%
12	Desember	13.319.590.000	1.222.569.430	11.993.552.769	90,04%

3. Penerimaan PNB

Penerimaan PNB pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke berasal dari Pemeriksaan Kapal dalam rangka penerbitan dokumen Kesehatan kapal (SSCEC, PHQC, COP, dan Health Book), ICV, dan Pemeriksaan/Pengobatan. Adapun realisasi penerimaan PNB dan realisasi penggunaan PNB dapat dilihat pada Tabel.

Tabel 32 Penerimaan dan Realisasi PNB

NO	BULAN	KANTOR INDUK	WILAYAH KERJA				JUMLAH	REALISASI PNB
			PELABUHAN LAUT AGATS	PELABUHAN LAUT BADE	PELABUHAN LAUT WANAM	BANDARA MOPAH		
1	Januari	19.305.000	665.000	6.840.000	525.000	250.000	27.585.000	
2	Februari	20.035.000	1.460.000	6.770.000	1.195.000	350.000	29.810.000	
3	Maret	21.885.000	2.400.000	7.700.000	3.830.000	350.000	36.165.000	10.978.000
4	April	10.075.000	1.935.000	4.775.000	2.050.000	350.000	19.185.000	16.010.000
5	Mei	20.985.000	1.950.000	5.870.000	2.240.000	300.000	31.345.000	8.339.000
6	Juni	14.480.000	1.500.000	6.840.000	3.685.000	400.000	26.905.000	14.432.900
7	Juli	21.675.000	1.560.000	2.905.000	1.370.000	300.000	39.990.000	16.320.000
8	Agustus	48.795.000	2.325.000	2.595.000	1.995.000	550.000	56.260.000	16.230.000
9	September	24.040.001	1.450.000	3.195.000	1.100.000	200.000	29.985.001	16.744.000
10	Oktober	23.550.000	2.905.000	2.805.000	2.675.000	300.000	32.235.000	49.092.500
11	November	24.735.000	1.450.000	1.740.000	1.825.000	300.000	30.050.000	29.144.000
12	Desember	21.035.000	2.835.000	7.770.000	2.910.000	300.000	34.850.000	49.488.207

4. Realisasi KRO dan RO

Realisasi Anggaran dan layanan dapat dilihat pada table

Tabel 33. Realisasi KRO dan RO Tahun 2022

NO	KODE	URAIAN	Target		PAGU AWAL	PAGU REVISI 3	REALISASI	SISA
1	4249.PEA.001.051	Koordinasi pelayanan kekarantinaan di pelabuhan/bandara/PLBD	4	Kegiatan	Rp 124,260,000	181,960,000	178,998,164	Rp 2,961,836
2	4249.QAA.012.053	Pemeriksaan kesehatan masyarakat - rp	300	Orang	64,044,000	38,932,000	37,326,800	Rp 1,605,200
3	4249.QAH.016.052	Pengendalian faktor risiko lingkungan - pnpb	232	Layanan	411,290,000	350,190,000	317,110,812	Rp 33,079,188
4	4249.QAH.017.052	Pemeriksaan orang, barang, alat angkut - pnpb	473	Layanan	372,770,000	264,010,000	249,494,902	Rp 14,515,098
5	4249.QAH.U02.053	Pelaksanaan kekarantinaan kesehatan di bandara – rp	104	Layanan	Rp 62,400,000	62,400,000	Rp 56,349,600	Rp 6,050,400
6	4249.QAH.U03.053	Layanan kekarantinaan kesehatan di PLBD - rp	24	Layanan	Rp 38,400,000	19,200,000	Rp 8,600,000	Rp 10,600,000
7	4249.QAH.U04.053	Pelayanan kesehatan pada situasi khusus - rp	90	Layanan	Rp 87,300,000	87,300,000	Rp 87,270,000	Rp 30,000

8	4249.QAH.U07.053	Pengendalian vektor DBD – rp	40	Layanan	Rp	42,440,000	42,440,000	Rp	42,084,647	Rp	355,353
9	4249.QAH.U08.052	Layanan survei vektor pes – pnbp	36	Layanan		92,628,000	92,628,000	Rp	92,572,500	Rp	55,500
10	4249.QAH.U09.053	Pengendalian vektor diare – rp	48	Layanan	Rp	20,784,000	20,784,000	Rp	16,734,000	Rp	4,050,000
11	4249.QAH.U10.053	Pengendalian Vektor Malaria – rp	18	Layanan	Rp	22,086,000	22,086,000	Rp	19,380,000	Rp	2,706,000
12	4249.QAH.U11.053	Pelaksanaan survei vektor DBD – rp	144	Layanan	Rp	46,080,000	46,080,000	Rp	46,080,000	Rp	-
13	4249.QAH.U12.053	Survei vektor malaria - rp	48	Layanan	Rp	80,304,000	80,304,000	Rp	80,304,000	Rp	-
14	4249.QAH.U13.053	Survei vektor diare - rp	48	Layanan	Rp	15,360,000	15,360,000	Rp	14,760,000	Rp	600,000
15	4249.QAH.U14.053	Pelaksanaan pencegahan pengendalian HIV AIDS – rp	5	Layanan	Rp	15,125,000	15,125,000	Rp	15,081,375	Rp	43,625
16	4249.QAH.U15.053	Deteksi dini terduga TB - rp	20	Layanan	Rp	91,100,000	91,100,000	Rp	90,775,050	Rp	324,950
17	4249.QAH.U18.051	Layanan kegawat daruratan- rm	5	Layanan	Rp	4,475,000	4,475,000	Rp	1,325,000	Rp	3,150,000
18	4249.QAH.U20.053	Layanan Penemuan Aktif Surveilnas migari malaria - rp	24	Layanan	Rp	20,880,000	20,880,000	Rp	20,840,000	Rp	40,000

19	4249.RAB.001.053	pengadaan alat dan bahan kesehatan - rp	2	Paket	Rp 597,875,000	394,205,000	Rp 393,060,868	Rp 1,144,132
20	4249.TBC.001.052	Pelatihan bidang kesehatan – pnbp	12	Orang	Rp 150,480,000	176,800,000	Rp 170,174,774	Rp 6,625,226
			1701		Rp 2,360,081,000	Rp 2,026,259,000	Rp 1,938,322,492	Rp 87,936,508
1	4815.AEA.502.051	Pelaksanaan koordinasi lintas sektor lintas program	12	Kegiatan	Rp 328,544,000	Rp 294,544,000	Rp 291,905,264	Rp 2,638,736
2	4815.EBA.956.051	Pengelolaan BMN	12	Layanan	Rp 35,140,000	Rp 35,140,000	Rp 33,497,453	Rp 1,642,547
3	4815.EBA.957.051	Layanan Hukum dan Kepatuhan Internal Ditjen P2P	12	Layanan	Rp 16,310,000	Rp 14,310,000	Rp 14,310,000	Rp -
4	4815.EBA.958.051	Pelayanan humas dan protokoler	12	Layanan	Rp 39,500,000	Rp 29,500,000	Rp 29,434,500	Rp 65,500
5	4815.EBA.960.051	Pelaksanaan Layanan Organisasi dan Reformasi Birokrasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	12	Layanan	Rp 65,894,000	Rp 36,274,000	Rp 34,176,820	Rp 2,097,180
6	4815.EBA.962.051	Layanan umum dan perlengkapan	12	Layanan	Rp 119,150,000	Rp 106,510,000	Rp 105,634,313	Rp 875,687
7	4815.EAB.001.051	Gaji dan Tunjangan	12	Layanan	Rp 4,798,434,000	Rp 4,798,434,000	Rp 4,021,959,893	Rp 776,474,107

8	4815.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12	Layanan	Rp 3,370,200,000	Rp 3,370,200,000	Rp 2,935,382,737	Rp 434,817,263
9	4815.EBB.951.058	Pengadaan fasilitas perkantoran	66	Unit	Rp 307,800,000	Rp 305,319,000	Rp 301,748,231	Rp 3,570,769
10	4815.EBB.971.052	Pembangunan gedung	2	Unit	Rp 2,113,200,000	Rp 1,992,000,000	Rp 1,990,927,242	Rp 1,072,758
11	4815.EBC.954.055	Layanan Administrasi Kepegawaian Ditjen P2P	31	Orang	Rp 109,590,000	Rp 84,020,000	Rp 75,658,064	Rp 8,361,936
12	4815.EBD.952.051	Rencana program pencegahan pengendalian penyakit dan dukungan manajemen	12	Layanan	Rp 110,720,000	Rp 98,720,000	Rp 96,065,502	Rp 2,654,498
13	4815.EBD.953.501	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program	12	Dokumen	Rp 36,590,000	Rp 28,410,000	Rp 25,444,143	Rp 2,965,857
14	4815.EBD.955.051	Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P	12	Dokumen	Rp 137,210,000	Rp 99,950,000	Rp 99,086,115	Rp 863,885
			231		Rp 11,588,282,000	Rp 11,293,331,000	Rp 10,055,230,277	Rp 1,238,100,723
TOTAL			1932		Rp 13,948,363,000	Rp 13,319,590,000	Rp 11,993,552,769	Rp 1,326,037,231

C. SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA

Perbandingan Nilai BMN Pada Laporan Barang Dan Laporan Keuangan

Nilai BMN pada Laporan Barang Pembantu Pengguna Satuan Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 38.242.598.541 (tiga puluh delapan milyar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh satu), nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca gabungan intrakomtabel dan ekstrakomtabel yaitu: Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya. Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 34 Neraca Sarana dan Prasarana

NO	Uraian Neraca	IntraKomptabel (Rp)	%	EkstraKomptabel (Rp)	%	Gabungan (Rp)	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	116.682.000	100	0	0	116.682.000	100
	Sub Jumlah	116.682.000	100	0	0	116.682.000	100
II	Aset Tetap						
1	TANAH	6.129.239.000	100	0	0	6.129.239.000	100
2	PERALATAN DAN MESIN	19.472.842.567	99,92	17.126.732	0,08	19.489.969.299	100
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	12.515.385.242	100	0	0	12.515.385.242	100
	Sub Jumlah	38.117.466.809	99,96	17.126.732	0,04	38.134.593.541	100
III	Aset Lainnya						
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	8.677.000	100	0	0	8.677.000	100
	Sub Jumlah	8.677.000	100	0	0	8.677.000	100
	Total	38.225.471.809	99,96	17.126.732	0,04	38.242.598.541	100

..

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari realisasi anggaran berdasarkan 7 (tujuh) indikator diperoleh hasil terdapat 3 (tiga) indikator yang tidak terserap 100% , 2 (dua) indikator terserap 100% dan 2 (dua) indikator lebih dari 100%. Adapun rincian sebagai berikut :

1. Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pintu masuk negara 105 %
2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebesar 100 %
3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara sebesar 92 %
4. Nilai kinerja anggaran sebesar 104 %
5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 96 %
6. Kinerja implementasi WBK satker sebesar 96 %
7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya sebesar 116 %

Rata-rata capaian indikator pada tahun 2022 adalah sebesar (101%) lebih rendah dari rata-rata capaian indikator pada Tahun 2021 yaitu (106 %), tahun 2020 (116 %) dan Tahun 2019 (108%))

Keberhasilan pencapaian 4 (empat) indikator disebabkan karena :

1. Disiplin dan komitmen dari pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke
2. Kerjasama yang baik dengan Lintas Program dan Lintas Sektor
3. Sarana dan prasarana yang memadai

Kegagalan pencapaian target indikator disebabkan karena :

1. Evaluasi kegiatan setiap pokja dan Tim WBK tidak rutin dilaksanakan
2. Upaya tindak lanjut dari hasil *assessment* ltjen tahun 2021 belum sepenuhnya dilaksanakan
3. Advokasi dan Sosialisasi kepada pegawai terutama yang berada di wilayah kerja tentang implementasi WBK belum dilaksanakan
4. implementasi WBK pada Satker Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke belum optimal
5. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai RPD dan RPK

Dari *assessment* yang dilakukan oleh Ditjen P2P diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa Pokja yang belum memahami kegiatan yang harus dilaksanakan dalam Pokja sehingga nilai *assessment* beberapa Pokja tidak mencapai target yang ditetapkan pada Permenpan RB No. 52 tahun 2019 tentang penetapan target WBK

Berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-024.05.2.416057/2022, anggaran KKP Kelas III Merauke sebesar 13.319.590.000., dengan serapan sebesar 11.993.552.769 (90,04%). Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa serapan anggaran tahun 2022 lebih kecil serapan dari anggaran tahun 2021 sebesar 96,34%, tahun 2020 sebesar 80,35% dan 2019 sebesar 96,36%. Diharapkan dari kegagalan dan keberhasilan yang diperoleh dalam mencapai target di tahun 2022 dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan di tahun 2023.

C. Tindak Lanjut

Menindaklanjuti hasil capaian kinerja tahun 2022 ada beberapa hal yang harus dilakukan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut di tahun 2023 yaitu :

1. Meningkatkan kerjasama dengan Lintas Sektor dan Lintas Program lebih optimal
2. melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin untuk mengetahui permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan
3. Membuat perencanaan lebih akurat dan tepat
4. Meningkatkan komitmen dan disiplin seluruh pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke
5. Melakukan efisiensi/sisa anggaran untuk dialokasikan pada kegiatan yang lain yang dapat menunjang/mendukung pencapaian target indikator
6. Membuat/ menjadwalkan peningkatan SDM semua pegawai
7. Melaksanakan semua kegiatan sesuai RPD dan RPK



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Bambang Budiman
Jabatan : Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS
Jabatan : PIt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama menerima DIPA sebesar Rp. 13.948.363.000, berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS
NIP 196405201991031003

dr. Bambang Budiman
NIP 196905312006041001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III MERAUKE**

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan	345.500
		2	Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	97%
		3	Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara	95%
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4	Nilai kinerja anggaran	85
		5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93
		6	Kinerja implementasi WBK satker	75
		7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	80%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Rp. 2.360.081.000
2.	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp. 11.588.282.000
TOTAL		Rp. 13.948.363.000

Jakarta, Desember 2021

Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke



Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS
NIP 196405201991031003

dr. Bambang Budiman
NIP 196905312006041001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Bambang Budiman
Jabatan : Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama menerima DIPA sebesar Rp. 13.319.590.000 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juli 2022

Pihak Kedua,

Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS
NIP 196405201991031003

Pihak Pertama,

dr. Bambang Budiman
NIP 196905312006041001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III MERAUKE**

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Kekeamtinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1	Indeks deteksi faktor risiko di pintu masuk negara	0,93
		2	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	100 %
		3	Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara	0,98
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4	Nilai kinerja anggaran	85
		5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	93
		6	Kinerja implementasi WBK satker	75
		7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	68 %

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Dukungan Pelayanan Kekeamtinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Rp. 2.026.259.000
2.	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp. 11.293.331.000
TOTAL		Rp. 13.319.590.000

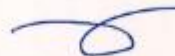
Jakarta, Juli 2022

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit



Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS
NIP 196405201991031003

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke



dr. Bambang Budiman
NIP 196905312006041001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Bambang Budiman
Jabatan : Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama menerima DIPA sebesar Rp. 13.319.590.000 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juli 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS
NIP 196405201991031003

dr. Bambang Budiman
NIP 196905312006041001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III MERAUKE**

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1	Indeks deteksi faktor risiko di pintu masuk negara	0,93
		2	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	100 %
		3	Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara	0,98
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4	Nilai kinerja anggaran	85
		5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	93
		6	Kinerja implementasi WBK satker	75
		7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	68 %

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Rp. 2.026.259.000
2.	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp. 11.293.331.000
TOTAL		Rp. 13.319.590.000

Jakarta, Juli 2022

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke



Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS
NIP 196405201991031003



dr. Bambang Budiman
NIP 19690531200604100*



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Bambang Budiman
Jabatan : Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama menerima DIPA sebesar Rp. 13.319.590.000 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juli 2022

Pihak Kedua,

Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS
NIP 196405201991031003

Pihak Pertama,

dr. Bambang Budiman
NIP 196905312006041001

S

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III MERAUKE**

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Kekeamtinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1	Indeks deteksi faktor risiko di pintu masuk negara	0,93
		2	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	100 %
		3	Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara	0,98
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4	Nilai kinerja anggaran	85
		5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	93
		6	Kinerja implementasi WBK satker	75
		7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	68 %

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Dukungan Pelayanan Kekeamtinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Rp. 2.026.259.000
2.	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp. 11.293.331.000
TOTAL		Rp. 13.319.590.000

Jakarta, Juli 2022

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit



Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS
NIP 196405201991031003

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke



dr. Bambang Budiman
NIP 196905312006041001